

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG**

ANDI MIFTAHUL JANNAH
Nomor Stambuk: 10561 05106 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI MIFTAHUL JANNAH

Nomor Stambuk : 105610510614

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak bumi dan Bangunan diKelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Andi Miftahul Jannah

Nomor Stambuk : 105610510614

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

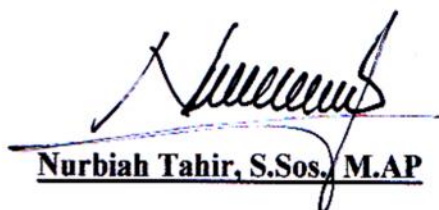
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M.Si

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

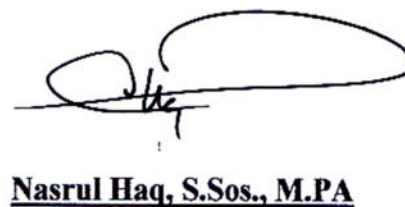
Dekan

Fisip Unismuh Makassar



Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan undangan menguji Skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 1595/FSP/A. 1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

Abd Kadir Adys, SH, MM (Ketua)

()


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

()

Haerana, S.Sos, M.Si

()

Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Miftahul Jannah

Nomor Stambuk : 10561 05106 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juni 2018

Yang Menyatakan,



Andi Miftahul Jannah

ABSTRAK

ANDI MIFTAHUL JANNAH (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nurbiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng. Keberhasilan kepemimpinan akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif dengan menjelaskan pengaruh antara Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang dengan menggunakan metode *Simple random sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka, observasi dan kuesioner. Data tersebut dianalisis secara statistic deskriptif kuantitatif dan teknik analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng mempunyai pengaruh yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis korelasi dan regresi sederhana yaitu, nilai korelasi *Pearson Correlation* dan nilai Beta pada table *Coefficient* sebesar 0,502 nilai ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh anatara variable Kepemimpinan (X) terhadap Kesadaran Masyarakat (Y) dengan kategori sedang. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan koefisien determinasi sebesar 25,5% artinya jika semakin baik Kepemimpinan maka semakin tinggi pula Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu. Sedangkan 74,5% merupakan faktor lain yang mempengaruhi variabel Y yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kesadaran Masyarakat dan Pajak Bumi dan Bangunan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membyar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis sadar bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan dimulai dari penulisan proposal, penelitian hingga penulisan skripsi ini. Namun berkat bantuan, arahan dan bimbingan dari : Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S. IP.,M.Si yang merupakan pembimbing I dan Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II, dengan setulus hati membimbing, mengarahkan, memberikan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. taklupa juga ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah Andi Hamka dan ibunda Siti Nurlaelah, S. PdI, yang selalu memberikan perhatian kasih sayang, semangat, dorongan, do’a dan dukungan moral serta materi selama ini.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Ayahanda Dr. H. Rahman Rahim, MM, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan Sebaik-baiknya.
2. Ibunda Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara, sekaligus sebagai penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Seluruh Dosen pengampuh mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan seluruh dosen se Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya.
5. Para staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu dalam system administrasi yang diperlukan selama kegiatan perkuliahan.
6. Teman baik saya atas nama irman selalu membantu dan mendukung saya baik secara materi maupun dukungan moral selama saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh informan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
8. Teman-teman fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kakanda, adinda, danteman-teman angkatan 014 yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan juga keluarga besar AND G yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam menempuh perkuliahan yang memiliki banyak karakter unik sebagai semangat dalam perkuliahan.

9. Teman-teman KKP angkatan XV Fisip Unismuh Makassar yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan bias dijadikan sebagai bahan referensi untuk penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan karya tulis ini.

Makassar, Juni 2018



Andi Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Kepemimpinan	7
B. Konsep Kesadaran	19
C. Konsep PBB	21
D. Konsep Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar PBB	27
E. Kerangka Pikir	31
F. Devinisi Operasional	32
G. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
A. Deskripsi Obyek Penelitian	45
B. Analisis Deskripsi	53
C. Pengaruh Kepemimpinan (X) terhadap Kesadaran Masyarakat (Y).....	85
BAB V Penutup	90

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 : Kriteria Jawaban Responden.....	42
Tabel III. 2 : Interpretasi Koefisien Kolerasi Nilai	43
Tabel IV. 1 : Struktur Pemerintahan Kampung Warga	49
Tabel IV. 2 : Rukun Tetangga	50
Tabel IV. 3 : Tanggapan Responden Lurah memberikan sosialisasi.....	54
Tabel IV. 4 : Tanggapan Responden Masyarakat berantusias.....	55
Tabel IV. 5 : Tanggapan Responden Lurah Mengadakan Seminar	56
Tabel IV. 6 : Indikator Proses Kelompok	57
Tabel IV. 7 : Tanggapan Responden Lurah Memberikan Motivasi.....	59
Tabel IV. 8 : Tanggapan Responden Lurah Mengingatkan Membayar PBB	60
Tabel IV. 9 : Tanggapan Responden Memberikan Pelayanan Baik	61
Tabel IV. 10 : Indikator Kemampuan Mempengaruhi	62
Tabel IV. 11 : Tanggapan Responden Sarana Sudah Lengkap	64
Tabel IV. 12 : Tanggapan Responden Sarana Memenuhi Standar	65
Tabel IV. 13 : indikator Sarana Pencapaian Tujuan	66
Tabel IV. 14 : Tanggapan Responden Tentang Kepemimpinan	67
Tabel IV. 15 : Pendapatan PBB Tiga Tahun Terakhir	69
Tabel IV. 16 : Tanggapan Responden Mampu Membayar PBB	71
Tabel IV. 17 : Tanggapan Responden Membayar PBB Sesuai Harta	72
Tabel IV. 18 : Tanggapan Responden Mengetahui Arti Penting PBB	73
Tabel IV. 19 : Tanggapan Responden Lurah Adil Pembayaran PBB	74
Tabel IV. 20 : Indikator Struktur Sosial Masyarakat	75

Tabel IV. 21 : Tanggapan Responden Pihak Kelurahan Mempermudah.....	77
Tabel IV. 22 : Tanggapan Responden Memberikan Pelayanan	77
Tabel IV. 23 : Tanggapan Responden Tingkat Kepuasan Masyarakat	78
Tabel IV. 24 : Indikator Sikap Petugas dalam Menagih	79
Tabel IV. 25 : Tanggapan Responden Menerapkan Sanksi	81
Tabel IV. 26 : Tanggapan Responden Sanksi Merata dan Adil	82
Tabel IV. 27 : Indikator Sanksi	83
Tabel IV. 28 : Tanggapan Responden tentang Kesadaran Masyarakat	84
Tabel IV. 29 : Pendapatan PBB Tiga Tahun Terakhir	86
Tabel IV. 30 : Anova	86
Tabel IV. 31 : Coefficient	87
Tabel IV. 32 : Model Summary	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir	31
Gambar2 : Struktur Organisasi Kelurahan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ketahun memerlukan pembiayaan yang semakin besar. Hal ini berarti bahwa usaha pencairan dan penggalan sumber-sumber dana harus digiatkan dan ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada sehingga pembangunan dalam negeri berjalan dengan baik.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan yang nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali kota atau Bupati, didalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai penerima

pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Camat. Kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari (a) Pendapatan asli daerah meliputi : (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (b) Pendapatan transfer; dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketentuan diatas, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, kewenangan memungut Pajak Bumi dan bangunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Kemudian kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pajak daerah dan Retribusi Daerah Untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam pemungutan pajak ini.

Kepemimpinan secara luas adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi (Rivai, 2009:2). Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan sangat mempengaruhi kemana arah suatu organisasi dan menentukan tujuan suatu organisasi. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendanaan

pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan bangsa.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah atau bangunan tersebut (pemilik atau penyewa). Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penangannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini pemimpin sangat berperan penting dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan karena pemimpin puncak utama yang bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi didalam organisasinya. Keterangan di atas memberikan kesimpulan bahwa pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Termasuk kepemimpinan Lurah yang dimana lurah berperan mengatur seluruh aspek yaitu: Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan masyarakat,

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. termasuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,561. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai positif sebesar 4,844 hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 31,47%, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, di Kelurahan kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota. (Oktaliana, 2009)

Penelitian di atas menjelaskan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Lurah dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi kenyataannya setiap pelaksanaan suatu kebijakan pasti ada saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh setiap daerah contohnya saja hambatan yang dihadapi di kelurahan Bonto Sunggu yaitu: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Masih banyak masyarakat yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (3) Terbatasnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pentingnya PBB, (4) Kurangnya Sosialisasi dari Pihak Kelurahan.

Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara, serta melihat penelitian terdahulu tentang Pengaruh kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (di kelurahan Kota Matsum) maka penulis tertarik pula melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan responden tentang kepemimpinan ?
2. Bagaimana tanggapan responden tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui tanggapan responden tentang kepemimpinan
2. untuk mengetahui tanggapan responden tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan

3. untuk mengetahui kepemimpinan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kepemimpinan, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Dilihat dari sisi bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Menurut Kartono (Rivai dkk, 2012:2) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan disuatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan.

Menurut Bennis (Pasolong, 2008:2) mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil didunia, dan kepastian dengan hasil hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya.

Menurut Toha (Oktaliana, 2009) pemimpin birokrasi merupakan : “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Beberapa defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki jabatan yang tertinggi dan

memiliki kepribadian khusus yang mampu mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai suatu tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dimana pemimpin sangat berperan penting dalam menentukan kemana arah organisasi itu.

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Sedang ilmu administrasi adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial, dan merupakan salah satu perkembangan dari filsafat. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.

Gibson dkk (Pasolong, 2008:4) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa dan memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Defenisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan.

Fiedler (Pasolong, 2008:47) menyatakan bahwa kinerja dapat dicapai secara efektif apabila pemimpin dalam organisasi tersebut mengembangkan suatu kepemimpinan situasional. Pendekatan situasional merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda.

Beberapa defenisi dan teori kepemimpinan diatas Stogdill (Pasolong, 2008:5) mencoba mempetakkan teori kepemimpinan yaitu :

1. Kepemimpinan sebagai proses kelompok
2. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat
3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi
5. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku
6. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur

Teori kepemimpinan membahas tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi, mampu memecahkan masalah yang dihadapi seluruh bawahan yang dipimpinnya.

2. Sifat Kepemimpinan

Menurut Dewantara (Kolaborasi Jurnal Administrasi, 2015:100) menyatakan ada 3 (tiga) sifat Kepemimpinan yaitu :

- a. Pemimpin harus menjadikan dirinya sebagai panutan dan tauladan melalui sifat dan perbuatannya terutama sifat adil dan jujur dalam menjalankan tugas.
- b. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat pada bawahannya.
- c. Seorang pemimpin harus mampu atau sanggup bertanggung jawab bagi orang yang dipimpinnya.

3. Tipe Kepemimpinan

Kartono (2014:81-86) mengatakan bahwa ada beberapa tipe kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

- a. *Tipe Karismatis, tipe Karismatis* ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Sampai sekarangpun orang tidak mengetahui benar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu memiliki karisma begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan ghaib (*supernatural power*) dan kemampuan-kemampuan yang *superhuman*, yang diperolehnya sebagai karunia yang Mahakuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar.
- b. *Tipe Paternalistis* yaitu tipe Kepemimpinan yang kepatuhan, dengan sifat-sifat yaitu, dianggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, dia bersikap terlalu melindungi (*overly protective*), dan selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
- c. *Tipe Militaristis* tipe ini sifatnya sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter.
- d. *Tipe Otokratis, tipe Otokrat* mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada *a one-man show*.

- e. *Tipe Laizssez Faire*, tipe ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri.
- f. *Tipe Populistis*, mendefenisikan kepemimpinan sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan *solidaritas* rakyat misalnya soekarno dengan ideologi marhaenismenya.
- g. *Tipe Administratif* atau *eksekutif* adalah tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.
- h. *Tipe Administratif* berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik.

4. Fungsi Kepemimpinan

Menurut Hick dan Gullet (Pasolong, 2008:22) membagi 8 (delapan) fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Pemimpin sebagai penengah
- b. Pemimpin sebagai penganjur
- c. Pemimpin sebagai pemenuhan tujuan
- d. Pemimpin sebagai katalisator
- e. Pimpinan sebagai pemberi jaminan
- f. Pimpinan sebagai yang mewakili
- g. Pimpinan sebagai pembangkit semangat
- h. Pimpinan sebagai pemuji

5. Unsur-unsur Mendasari kepemimpinan

Veithzal Rivai (2012:23) mengatakan ada 3 (tiga) unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan, Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan).
- b. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok.
- c. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Melaksanakan tugas kepemimpinan untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang menuju kearah tujuan tertentu, kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut timbul dari diri kita sendiri. Pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok dan situasi waktu kita melaksanakan kepemimpinan.

Faktor-faktor yang berasal dari diri kita sendiri dan juga dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan kita adalah pengertian kita tentang kepemimpinan itu sendiri, nilai atau hal yang kita kejar dalam kepemimpinan, cara kita yang membuat kita berhasil menduduki posisi kepemimpinan, dan pengalaman yang telah kita miliki dalam bidang kepemimpinan.

Pengetahuan seseorang tentang kepemimpinan dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinannya. Orang yang memiliki pandangan bahwa kepemimpinan itu merupakan status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, barang, kemudahan hidup, jelas akan menunjukkan kualitas praktek kepemimpinan yang sama sekali berbeda dengan orang yang memaknai kepemimpinan sebagai pelayanan bagi

kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya dan memandang fasilitas kepemimpinan sebagai alat untuk dapat melayani dengan lebih baik lagi. Menurut Soekarso dkk (2010:21) faktor-faktor kepemimpinan yaitu:

1. Pemimpin (*leader = head*) adalah orang yang memimpin.
2. Anggota (anak buah = pengikut) adalah orang-orang yang dipimpin.
3. Kekuasaan (*power*) adalah kapasitas mempengaruhi perilaku individu atau kelompok.
4. Pengaruh (*influence*) adalah tindakan atau contoh perilaku yang menyebabkan mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku individu atau kelompok.
5. Nilai (*value*) adalah keyakinan dasar tentang sesuatu mempengaruhi perilaku atau cara bertindak individu atau kelompok.
6. Tujuan (*objective*) adalah suatu hasil atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Gibson (Surdiana, 2009:273-274) kepemimpinan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu :

1. *Leader's traits*

Variabel ini terdiri dari kemampuan dan keterampilan seperti *interpersonal skill* dan IQ, kepribadian pemimpin seperti ketahanan terhadap stres dan kepercayaan diri dalam memimpin, serta motivasi pemimpin untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Leader's behavior*

Perilaku pemimpin dapat dibedakan menjadi

a. *Task oriented*

Pemimpin yang berfokus pada penyelesaian tugas dan menggunakan pengawasan yang ketat sehingga bawahan melakukan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b. *Person oriented*

Berfokus pada orang yang melakukan pekerjaan dan membantu pengikut dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

c. *Consideration*

Melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghormati, adanya kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut.

d. *Initiating structure*

Pemimpin mengatur hubungan dalam kelompok, membuat pola komunikasi, dan merincikan bagaimana pekerjaan itu diselesaikan.

3. *Situational variables.*

Variabel situasional mencakup tiga variabel yaitu:

- a. Hubungan antara pemimpin dan bawahan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan diantara mereka dan juga rasa hormat yang dimiliki bawahan pada atasan.
- b. Struktur tugas, struktur tugas ini menunjukkan karakteristik tugas yang hendak diselesaikan dan siapa yang menegerjakan. Posisi kekuasaan,

posisi kekuasaan dilihat dari kemampuan pemimpin untuk memberikan penghargaan dan hukuman, serta kemampuan untuk memberikan semacam promosi.

Menurut Keith Davis (Thoha, 2003:15-16) ada empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan.

1. Kecerdasan

Bahwa pemimpin memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin

2. Kedewasaan dan Hubungan Sosial

Kepemimpinan cenderung matang dan mempunyai emosi yang stabil serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktifitas sosial.

3. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.

4. Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan

Seorang pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.

Beberapa pendapat para ahli diatas faktor kepemimpinan merupakan aspek yang penitng dalam sebuah organisasi agar semua yang terlibat didalamnya mampu mengikuti arahan dari seorang pemimpin karena pemimpin memiliki kecerdasan yang lebih dari pada bawahannya.

7. Indikator Kepemimpinan

Pemimpin adalah pengaruh bagi orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dituntut untuk mengetahui secara utuh potensi organisasi yang dibawahnya untuk mampu memahami permasalahan dari segala aspek. Selain itu, pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah dengan baik dan membungkusnya agar tidak menjadi kekhawatiran bagi bawahan yang dipimpinnya.

Penerapannya, pimpinan masih kurang optimal untuk mengelolah bawahannya serta dalam mengatasi permasalahan yang ada dibawah. Disinilah kematangan berpikir, keahlian berkomunikasi, serta menciptakan suasana kerja yang mendukung dari seorang pemimpin dibutuhkan.

Menurut Hamza B. Uno (Ramadani, 2009:58) indikator kepemimpinan yang mendasar dari perilaku sebagai pemimpin sebagai berikut:

a. Menantang Proses

Menantang proses disini pemimpin selalu mencari kesempatan atau peluang dalam upaya memajukan organisasi.

b. Memberi Inspirasi

Pimpinan menggambarkan masa depan organisasi atau memaparkan rencana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan kepada bawahan. Selain itu, pimpinan juga membantu orang lain atau pegawai dalam upaya pencapaian tujuan.

c. Memungkinkan Orang Lain Untuk bertindak

Mempercepat kerja sama antara pimpinan dengan pegawai, serta pegawai satu dengan pegawai lainnya. Hal ini pimpinan juga memperkuat pegawainya dalam melakukan pekerjaan.

d. Membuat Model Pemecahan

Pimpinan bersifat solutif atau memberikan solusi ketika organisasi atau bawahan sedang memiliki permasalahan. Pimpinan dapat memberikan contoh kepada bawahan dalam memecahkan masalah disertai memberikan rencana keberhasilan kecil apabila masalah tersebut dapat diselesaikan.

e. Memberikan Semangat

Pimpinan perlu mengakui kontribusi individu atau bawahannya. Pengakuan terhadap pegawai atau bawahan merupakan salah satu bentuk motivasi terhadap bawahannya. Pimpinan juga perlu merayakan prestasi kerja apabila tujuan ditentukan telah tercapai.

Menurut Wahjosum (Wijayanti, 2012:30-9) secara garis besar indikator kepemimpinan adalah sebagai berikut:

a. Bersikap adil

Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan diantar para anggota adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan dari pada kesepakatan antara para bawahan maupun antara pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Memberi Sugesti

Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya yang mampu menggerakkan hati orang lain dan sugesti mempunyai peranan yang sangat penting didalam memelihara dan membina harga diri bawahan.

c. Mendukung Tujuan

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis terbentuk melainkan harus didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap organisasi dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan dengan keadaan organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk bekerja sama.

d. Katalisator

Seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, apabila pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada, berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin agar bawahan merasa nyaman dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

e. Menciptakan Rasa Aman

Setiap pimpinan berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para bawahannya dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme didalam menghadapi segala permasalahan, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bawahan merasa aman, bebas dari segala perasaan gelisah, kekhawatiran, dan merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan.

f. Sebagai Wakil Organisasi

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala bidang kegiatan lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan atau panutan-panutan. Seorang pemimpin adalah segala-galanya, oleh karena itu segala perilaku, perbuatan, dan kata-katanya akan selalu memberikan kesan-kesan tertentu terhadap organisasinya.

g. Sumber Inspirasi

Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan semangat para bawahan sehingga bawahan menerima dan memahami tujuan organisasi dengan antusias dan bekerja secara efektif kearah tercapainya tujuan organisasi.

B. Konsep Kesadaran Masyarakat

1. Definisi Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Purwardaminta (Oktaliana, 2009:19).

Menurut Widjaja (Oktaliana, 2009:6) sadar (kesadaran) di defenisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan dan yang hidup dalam masyarakat.

2. Definisi Kesadaran Hukum

Hukum adalah seperangkat dari aturan atau kaidah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian untuk ditaati dan dilaksanakan.

Menurut Scolten (Oktaviani, 2011:11) kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa yang hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kewajiban kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, anatar yang selayaknya dilakukan dan yang tidak sepatasnya dilakukan.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada, dimana dalam hal ini kesadaran hukum juga merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, karena selama ini ada persepsi bahwa hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu

ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya.

C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soeparman Soeharmidjaja (Bohari, 2010:24) dari desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong” menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari defenisi diataa tidak tampak isitilah “dipaksakan” karenan bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”.

Menurut Tarmudji (2001:2) Pajak adalah iuran dari rakyat atau penduduk sebagai partisipasi mereka dalam mengisi kas negara guna menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik dan lancar.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undag-

Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Menurut Siahaan (2009:77) Pajak Bumi dan Bangunan Merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cakar budaya, rumah sakit dan panti asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan kedaerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

2. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No. 12 1994 yang dimaksudkan dengan obyek pajak adalah bumi dan bangunan yang berada di wilayah republik indonesia, yang klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada diwilayah Indonesia dapat dijadikan sebagai obyek pajak. menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Permukaan Bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.
- b. Bangunan: konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, empelasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, jalan tol, kolam renang, tambang minyak, dll.

Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki atau memperoleh manfaat atas bangunan. Artinya, sekalipun orang atau badan menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun jika secara nyata memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut maka wajib menanggung atau membayar pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat oleh bumi
3. Memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

(Oktaviani:20).

Subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Proses Pembayaran Pajak

Menurut Soemitro (Oktaliana, 2009:12) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan untuk sampai pada pembayaran mulai dari tahap pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), penyampaian surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), dan sampai dengan penyampaian surat ketetapan pajak (SKP), adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran, dalam rangka pendaftaran obyek pajak maka subyek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas obyek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek pajak PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi SPOP dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat obyek pajak berada. Data yang harus didaftarkan dapat dilihat pada SPOP tersebut, dan tata cara pendaftaran obyek kena pajak diatur dalam keputusan menteri keuangan No.19/KMK/04/Tahun 1986 tanggal 19 Januari 1986.
2. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat, dan waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kali setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

SPOP terlambat dikembalikan atau pengesiannya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan data yang tidak benar dengan sengaja maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) adapun yang dimaksud yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. SPPT ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan data yang diperoleh dalam SPOP yang dimasukkan oleh wajib pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Setelah SPO, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (pajak yang tertuang seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung.

4. Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Cara pembayaran PBB adalah wajib pajak yang telah menerima SPPT, SKP, dan STP dari KKP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui:

- a. Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau
- b. Petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi
- c. ATM dan Counter Teller Bank

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang

terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

5. Sanksi yang ada di dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana(Oktaviani:10) sebagai berikut:

1. Dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, isinya tidak benar sehingga negara dirugikan.
2. Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena pekerjaannya yang sengaja tidak memberikan dokumen atau memberikan keterangan sehingga negara dirugikan.
3. Didenda dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali

apabila belum setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan dan hukuman yang telah diatur sesuai undang-undang yang berlaku.

D. Konsep Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat seperti itu maka akan mendorong keinginan yang kuat untuk eningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat

Menurut Tarmudji (2011:14) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan 4 (empat) faktor yaitu:

a. Sebab Kultural dan Historis,

sebab dimana rakyat indonesia mengalami penjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad di zaman kolonial maupun pada saat pendudukan Jepang masih belum lupa pada kepahitan masa penjajahan. Berdasarkan kepahitan pada masa penjajahan tersebut, khususnya pada bidang perpajakan rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak. Walaupun Indonesia sudah merdeka rakyat masih beranggapan bahwa pajak membebankan mereka.

b. Kurangnya Informasi

Sebab kurangnya penyuluhan dan informasi yang diberikan dari pemerintah kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara.

c. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

Adanya kebocoran pada penarikan pajak, kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait dari petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Contohnya uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas untuk kepentingan serta keperluan pribadi.

d. Suasana individu (belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah)

Rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Tarmudji (2011:26) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak yaitu:

a. Struktur Sosial Masyarakat

1. Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat.
2. Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB .
3. Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah mampu atau tidak untuk membayar PBB.

- b. Sikap Petugas dalam Menagih
 - 1. Cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB.
 - 2. Usaha yang dilaksanakan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan tugasnya dalam menagih PBB.
- c. Pelayanan Pemerintah
 - 1. Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 2. Insentif pembayaran pajak, berupa pelayanan pemerintah yang lebih baik.
 - 3. Keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat.
- d. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
 - 1. Adanya aspek kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir PBB.
 - 2. Proses pembayaran PBB yang mudah diikuti wajib pajak
- e. Sanksi
 - 1. Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi.
 - 2. Penerapan sanksi secara tegas dan adil.

3. Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Menurut Hendono (Oktaviani:17) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan merupakan sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna

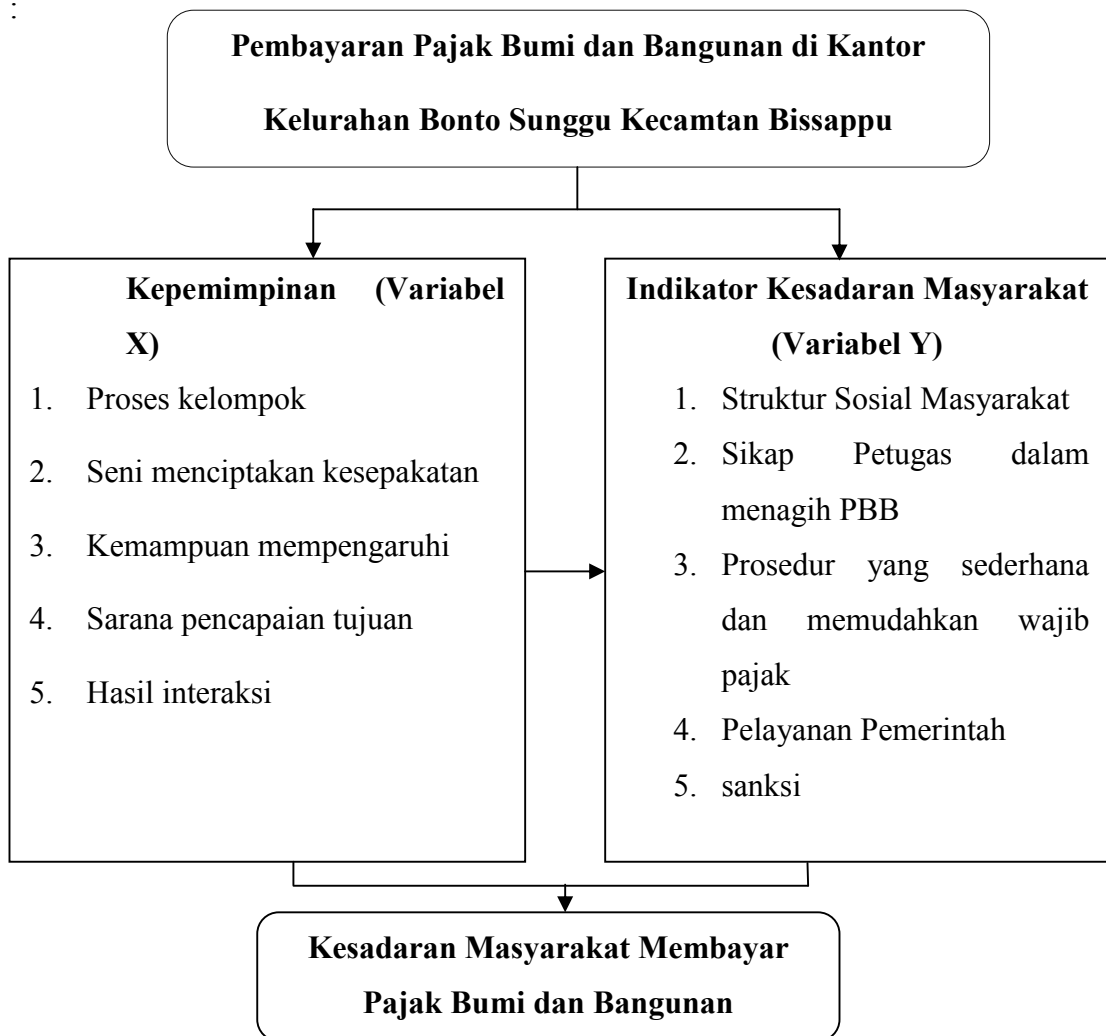
meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

- b. Meningkatkan Pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak seperti BANK terdekat sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Memberikan penghargaan, kelurahan serta kecamatan yang dapat menggerakkan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar tepat pada waktunya, untuk lebih memotivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dandapat memberikan suatu kebanggaan kepada individu.

E. Kerangka Pikir

Faktor-faktor diatas dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kerangka pikir ini disusun untuk memberikan gambaran dari alur penelitian yang dilakukakan. untuk melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu, dimana indikator dari variabel X (kepemimpinan) yaitu dapat dilihat dari proses kelompok, seni menciptakan kesepakatan, kemampuan mempengaruhi, sarana pencapaian tujuan dan hasil interaksi. Sedangkan indikator dari variabel Y (kesadaran masyarakat) yaitu, dilihat dari struktur sosial masyarakat, sikap petugas dalam menagih, pelayanan pemerintah, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak dan sanksi.

Dimana variabel X (kepemimpinan) mempengaruhi variabel Y (kesadaran masyarakat) agar tercapai kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut :



Gambar 1: kerangka Pikir

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan (X)

- a. Proses kelompok, yaitu dimana suatu kepemimpinan apapun yang

dilakukan harus berdasarkan kelompok saling bekerja sama agar pencapaian tujuan dapat tercapai.

- b. Seni menciptakan kesepakatan, kepemimpinan yaitu dimana pemimpin mampu menciptakan segala kesepakatan atau menentukan segala keputusan.
- c. Kemampuan mempengaruhi, dimana pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya (masyarakat) karena pemimpin lah yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan.
- d. Sarana pencapaian tujuan, dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuan ketika dalam suatu organisasi ada seorang pimpinan yang benar-benar menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana.
- e. Hasil interaksi, dimana dalam kepemimpinan melakukan suatu aktivitas yaitu interaksi antara bawahana dan pimpinan maka hasil dari interaksi tersebut yaitu menghasilkan suatu keputusan dan kesepakatan bersama.

2. Kesadaran Masyarakat (Y)

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adapun indikator yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Struktur Sosial Masyarakat yaitu, Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat. Baik itu Tingkat pendidikan

dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB serta Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah mampu atau tidak untuk membayar PBB.

- b. Sikap Petugas dalam Menagih yaitu, Cara petugas bersikap dalam menagih masyarakat harus ramah dan tidak berbelit-belit dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat berkewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak yaitu Adanya aspek kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelayanan Pemerintah yaitu usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB dan melayani masyarakat secara prima agar mengetahui pentingnya membayar Pajak serta memberikan pelayanan yang baik dan adil.
- e. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan memberikan alur untuk dapat membuktikan masalah yang diteliti. Pembuktian dari hipotesis tersebut memerlukan teori yang didukung oleh data fakta yang jelas. Berdasarkan dengan masalah yang diteliti. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis kausalitas (sebab akibat) yang dimana sebab akibat yang bersifat saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Jadi dalam kausalitas dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel independen (variabel yang

mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) maka penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

1. Hipotesis Nihil (H_0) Tidak terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
2. Hipotesis Alternatif (H_a) Terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 9 April sampai 9 Juni 2018, lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Laporan akhir untuk penelitian ini pada umumnya memiliki struktur yang ketat dan konsisten mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Seperti halnya peneliti kualitatif, siapapun yang terlibat didalam penelitian Kuantitatif juga perlu memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, mencegah munculnya bias-bias, mengontrol penjelasan-penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan menerapkan kembali penemuan-penemuannya Creswell (2016:5).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah survey yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dan responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat wajib pajak Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebanyak 1980 orang (wajib pajak). Sugiyono (2013:80)

Jumlah populasi masih besar sehingga penentuan populasi menggunakan teknik populasi sebagai berikut :

Jumlah populasi : 1980 orang (wajib pajak)
--

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Sugiyono (2013:81)

Teknik pengambilan sampel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Jumlah populasi penelitian yang cukup besar, yaitu 1980 orang dan adanya beberapa keterbatasan dari peneliti, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penarikan sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut :

Teknik Sampel

$$n = \frac{N}{(N \cdot d^2 + 1)}$$

Keterangan:

N = besar populasi

n = besar sampel

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (diambil 10% (0,1)

maka,

$$n = \frac{1980}{(1980 \cdot (0,1)^2 + 1)}$$

$$n = \frac{1980}{(1980 \cdot (0,01) + 1)}$$

$$n = \frac{1980}{19,8 + 1}$$

$$n = \frac{1980}{20,8}$$

n = 95 orang (wajib pajak)

Sehingga, 95 orang inilah yang akan menjadi sampel penelitian sekaligus menjadi responden penelitian yang akan dibagikan kuesioner nantinya.

D. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*liberari research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaan buku-buku literatur yang relevan dengan judul dan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian. Untuk menempatkan data lapangan, digunakan teknis sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang langsung dilakukan penulis terhadap arsip atau data tertulis yang dibuat secara berkala.
 - b. Kuesioner, yaitu pengumpulan sebuah data dengan menyebarkan daftar pertanyaan sehingga diperoleh data yang akurat. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, Sugiyono (2017 : 142). Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk *checklist*, dimana responden tinggal membubuhkan tanda *check* (✓) pada tempat yang telah disediakan. Peneliti membuat 2 (dua) buah kuesioner untuk penelitian ini, satu kuesioner untuk memperoleh data terkait Kepemimpinan (variabel X) dan satu kuesioner untuk memperoleh data terkait kesadaran masyarakat yang diberikan kepada masyarakat (variable Y). Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Nilai variabel yang diukur menggunakan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk

angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. *Skala Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi hal ini dijelaskan dalam Sugiyono (2017:93). Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5
2. Jawaban Setuju (S) : diberi skor 4
3. Jawaban Netral (N) : diberi skor 3
4. Jawaban Tidak Setuju (ts) : diberi skor 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan/ kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/ konsistensi kuesioner penelitian. Kuesioner yang sudah valid dan reliabel seluruh butirnya dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

Validitas konstruk (*construct validity*) dan validitas isi (*content validity*) akan dilakukan oleh peneliti untuk menguji apakah konstruk atau karakteristik (variabel laten) dalam penelitian ini, yaitu variabel kepemimpinan dan kesadaran masyarakat dapat diukur secara akurat oleh indikator-indikatornya. Peneliti akan melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan *software SPSS version 23.0*.

Reliabilitas, Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Instrumen dikatakan reliabel adalah jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai Cronbach's Alpa lebih besar dari 0,60. (Ghozali, 2005).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ada 2 yaitu :

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).

Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase (%). Penentuan persentase dari perolehan data hasil kuesioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan persentase:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

n = Skor yang diperoleh

N = Skor ideal

% = Persentase

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat yang

bersifat kuantitatif, dimana hasil persentase itu dapat digolongkan dibawah ini.

Tabel 3.1. Kriteria Jawaban Responden

Persentase Jawaban	Tafsiran
80% - 100%	Sangat Baik
60% - <80%	Baik
40% - <60%	Cukup Baik
20% - < 40%	Kurang Baik
0% - < 20%	Sangat Tidak Baik

(Arikunto, 2006: 246)

2. Teknik Analisis Korelasi Sederhana

Rumusan masalah dan hipotesis penelitian ini termasuk dalam kategori kausalitas, hipotesis kausalitas (sebab akibat) adalah sebab akibat yang bersifat saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Jadi dalam kausalitas dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) sehingga dapat dianalisis melalui teknik analisis korelasi sederhana, yaitu variabel kepemimpinan dan variabel kesadaran masyarakat.

Analisis korelasi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *software SPSS version 23.0*. Guna memberi interpretasi terhadap kuatnya korelasi yang terjadi maka

digunakan pedoman sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2. Interpretasi Koefisien Kolerasi Nilai

Interval Koefisien	Tingkat Korelasi
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2017: 184

1. Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis regresi linear sederhana digunakan untuk melihat pengaruh variabel Responsivitas terhadap variabel Kepuasan Masyarakat. Digunakan pula untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*). Adapun rumus persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan rumus:

\hat{Y} = variabel Kepuasan masyarakat

X = variabel Responsivitas Birokrasi

a = konstanta

b = koefisien regresi

Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *software SPSS version 20*. Hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya, adalah:

- a. Jika nilai P value (sig) $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika nilai P value (sig) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Bonto Sunggu

Kelurahan Bonto Sunggu awal mulanya adalah sebuah desa yang terletak di Tala - Tala. Yang artinya banyak bukit- bukit yang ada disekitarnya dan masyarakat menginginkan suatu saat dengan banyak bukit–bukit tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan masyarakat sehingga mereka menyepakati untuk diberi nama Bonto Sunggu.

Konon katanya Bonto sunggu adalah tempat bersarangnya gerombolan, yang setiap saat datang mengganggu ketentraman masyarakat. Banyak orang yang dipenggal kepalanya dan dibiarkan berserakan begitu saja dan banyak juga rumah penduduk yang dibakar sehingga perempuan–perempuan yang keluar mengumpulkan kayu bakar dan mengangkat air merasa ketakutan melihat kejadian tersebut. Masyarakat menjadi resah dengan adanya sekelompok gerombolan yang ada di Bonto Sunggu sehingga mereka mengantisipasi dengan cara membuat lubang sebagai tempat persembunyian pada waktu malam hari. Menurut cerita ketika gerombolan masuk didaerah Tangnga–Tangnga untuk melakukan keributan maka amarahnya menjadi redah sehingga kampung tersebut dinamakan kampung Tangnga–Tanganga.

Lingkungan Tangnga–Tangnga ada juga kampung yang bernama Pocci Buttaya yang artinya adalah pusat dari tanah yang ada ditangnga-tangnga. Menurut cerita pusat tanah tersebut banyak batu diatasnya sehingga ketika ada seseorang

yang mengangkat batu tersebut maka tanah akan lubang kebawah sehingga akan menimbulkan kejadian/peristiwa yang tidak diinginkan. Sampai sekarang masyarakat menganggap kampung poccibuttayya adalah kampung yang angker.

Awalnya sistem pemerintahan di Bonto Sunggu diperintah oleh Jannang, Jannang pertama yang memerintah adalah Jannang Pallawa kemudian digantikan oleh Jannang Kallabo lalu Ambo Canning yang terakhir adalah Jannang Pattola. Pada masa pemerintahannya banyak perubahan yang terjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai sekarang. Setelah Jannang Pattola wafat digantikan oleh Nurmin Syawal pada tahun 1978 – 1980. Pada masa pemerintahannya belum banyak mengalami kemajuan. Kemudian digantikan oleh Wahid, lalu Tjenreng pada tahun 1980 – 1983 yang membawahi beberapa lingkungan antara lain adalah :

- a. Lingkungan Tala-Tala
- b. Lingkungan Tangnga–Tangnga
- c. Lingkungan Beloparang

Pada masa jabatan Tjenreng Desa Bonto Sunggu diusulkan untuk menjadi persiapan Kelurahan. Pada tahun 1986 Desa Bonto Sunggu resmi menjadi kelurahan (defenitif). Kemudian dimekarkan menjadi kelurahan Bonto Atu dan kelurahan Bonto Lebang. Setelah masa jabatannya habis, Tjenreng digantikan oleh Yakele dg ngolo, kemudian digantikan Lagi oleh A.R.Awaluddin.BA.Lalu Amiruddin.BA. Kemudian Mahmud Baddu, Kemudian Kr.Syamsi masa pemerintahan Kr. Syamsi tidak lama karena sesuatu hal sehingga digantikan oleh Anwar Nurmin masa jabatan dari Anwar Nurmin juga tidak lama karena waktu itu

pemilihan bupati di Bantaeng Bupati DR. Nurdin Abdullah melakukan perombakan dari semua pemerintahan kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sesuai dengan keputusan Bupati yang memerintah di Kelurahan Bonto Sunggu adalah Hj. Sohrah tahun 2008. Hj Sohrah memimpin Kelurahan Bonto Sunggu kurang lebih tiga tahun. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2011 Hj Sohrah di gantikan oleh Nasir Awing, S.Sos. setelah itu digantikan oleh Kareng Bella hingga sekarang.

Kelurahan Bonto Sunggu terletak diwilayah pemerintahan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Jarak dari Ibu kota Kecamatan \pm 3 Km dan jarak dari Ibukota Kabupaten \pm 3 Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh kekota Kecamatan \pm 10 menit, dan \pm 15 menit menuju Ibu kota Kabupaten.

Luas wilayah Kelurahan Bonto Sunggu \pm 2,74 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores.
3. Sebelah Utara berbatasan Kelurahan Bonto Atu dan Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng.

a. Fotografi Kelurahan

KelurahanBontoSunggu merupakan wilayah yang terdiri dari 3 dimensi

(pesisir, dataran dan ketinggian). Tiga dimensi tersebut dapat digambarkan bahwa untuk wilayah pesisir terletak di perkampungan tangnga-tangnga, cabodo, bungung bambang.dan wilayah dataran terletak di perkampungan poccibuttayya dan sasayya serta wilayah Pengunungan/ketinggian terletak perkampungan Bira-bira.Ketinggian dari permukaan laut 500 mtr.

2. Visi dan Misi Kelurahan Bonto Sunggu

a. Visi

Terwujudnya Kelurahan Bonto Sunggu yang maju dalam pengelolaan sumber daya alam (Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Rumput Laut) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga dengan pengelolaan dan pemanfaatannya senantiasa menjaga kelestarian dan berkesinambungan dengan kemampuan dan kapasitas yang memadai.

Masyarakat Bonto Sunggu khususnya orang miskin, perempuan dan yang terpinggirkan memperoleh pelayanan yang bermutu melalui pengembangan usaha, pendidikan, kesehatan dan Administrasi Pemerintahan dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar (tempat sampah, saluran pembuangan air limbah).

Terbangun hubungan kerjasama yang harmonis sesama warga, pemerintah dan warga dengan senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Warga sadar dan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan ditingkat RT, RW , Kelurahan maupun dalam organisasi sendiri. Kapasitas Pemerintah Kelurahan dan lembaga-lembaga seperti LPM, PKK dan Karang Taruna cukup memadai dan menerapkan nilai-

nilai demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta berkeadilan dalam pembangunan kelurahan.

b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan Kelurahan tersebut di atas, ditetapkan beberapa misi pembangunan Kelurahan Bonto Sunggu Tahun 2012 – 2016 :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan dan rumput laut.
3. Peningkatan pelayanan public guna terciptanya pemerintahan yang berkualitas.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha bersama.
5. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal.
6. Mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.

3. Administrasi Kelurahan

Secara administrasi Kelurahan Bonto Sunggu terbagi atas beberapa kampung yaitu Kampung Tangnga-Tangnga, Kampung Pocci Buttayya, Kampung Cabodo, Kampung Sasayya, kampung Bungung bambang dan Kampung Bira-Bira. JikaditHubungkan dengan struktur pemerintahan yang ada, maka kampung tersebut

dapat di klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel Struktur Pemerintahan Kampung/Rukun Warga

No	Kampung	Struktur Pemerintahan
1	Kampung Tangnga-Tangnga	Rukun Warga I (RW)
2	Kampung Pocci Buttayya	Rukun Warga II (RW)
3	Kampung Cabodo	Rukun Warga III (RW)
4	BTN Sasayya	Rukun Warga IV (RW)
5	Kampung Bungung Bambang	Rukun Warga V, (RW)
6	Kampung Sasayya	Rukun Warga VI (RW)
7	Kampung Bira-Bira	Rukun Warga VII (RW)

(Sumber : Dokumen Kelurahan, 2017)

Setiap Rukun Warga tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan Publik kepada Masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas tersebut Ketua RW dibantu oleh Rukun tetangga (RT) sebagai bagian dari unsur pemerintahan terKecamatanil di kelurahan Bonto Sunggu. Dari 7 Rukun Warga tersebut diatas memiliki Rukun tetangga (RT) sebanyak 27 RT.

Setiap Rukun Warga tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan Publik kepada Masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas tersebut Ketua RW

dibantu oleh Rukun tetangga (RT) sebagai bagian dari unsur pemerintahan terkecil di kelurahan Bonto Sunggu dari 7 Rukun Warga tersebut diatas memiliki

Rukun tetangga (RT) sebanyak 27 RT sebagaimana dapat kami uraikan pada tabel berikut :

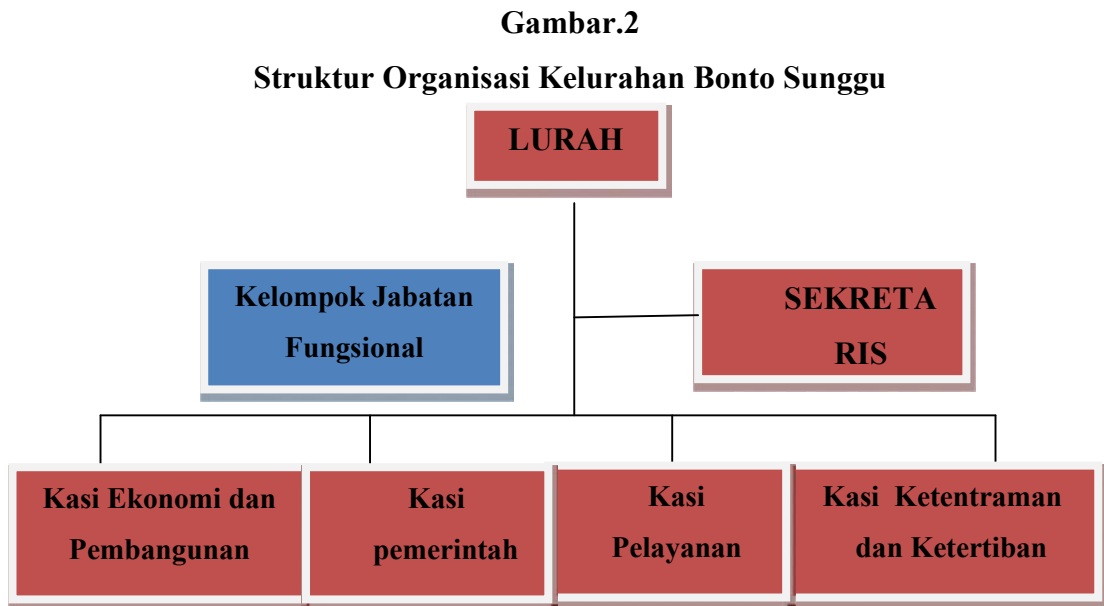
Tabel 4.2 Rukun Tetangga

Rukun Warga (RW)	Ketua Rukun Warga (RW)	Struktur Pemerintahan (Rukum Tetangga)
Rukun Warga I	H.Ridwan Samadi	6 Rukun Tetangga (RT)
Rukun Warga II	Hasdi Rusdi	6 Rukun tetangga (RT)
Rukun Warga III	ABD. Malik	4 Rukun Tetangga (RT)
Rukun Warga IV	Calla	3 Rukun tetangga (RT)
Rukun Warga V	M. Basir	2 Rukun tetangga (RT)
Rukun warga VI	L.Kadang	4 Rukun tetangga (RT)
Rukun Warga VII	Siamang	3 Rukun tetangga (RT)

(sumber : Dokumen Kelurahan, 2017)

Selain dari Unsur Pemerintahan Rukun warga dan Rukun Tetangga sebagaimana diuraikan pada tabel tersebut diatas, Kepala Kelurahan Bonto Sunggu dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh beberapa unsur pemerintahan lainnya seperti Sekretaris Kelurahan, Kaur, dan beberapa orang staff. Kepala Kelurahan pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat

Kelurahan dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat. Kemudian, Pemerintah Kelurahan bersama dengan LPM wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakatnya. Selanjutnya struktur organisasi di kelurahan Bonto Sunggu :



4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok, lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Melaksanakan tugas dan fungsi, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

b. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyeenggaraan pemerintahan dan memberikan layanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program ditingkat kelurahan.
2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dari penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
3. Menyelenggarakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

c. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Kasi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

d. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.

e. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum.

f. **Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

B. Analisis Deskripsi

1. Hasil Analisis Tanggapan Responden tentang Kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu

Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok orang untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahannya agar mencapai tujuan suatu organisasi. Maka untuk mengetahui tanggapan responden tentang kepemimpinan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan lima indikator instrumen tersebut. Adapun indikator Kepemimpinan yaitu proses kelompok, kemampuan mempengaruhi dan sarana pencapaian tujuan.

a. Proses Kelompok

Proses kelompok dalam kepemimpinan adalah dimana suatu pemimpin harus menjalankan organisasinya berdasarkan proses kelompok agar terciptanya kerjasama dan mencapai tujuan organisasi. Proses kelompok dalam penelitian ini adalah Tanggapan Responden Lurah Memberikan Sosialisasi tentang pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggapan responden berantusias ikut

serta dalam sosialisasi penting nya membayar PBB yang diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu, Tanggapan Responden Lurah Mengadakan Seminar-Seminar tentang Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, . Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari 95 responden terhadap sub indikator proses kelompok dapat dilihat dalam pengolahan data tabel 4.3 sampai 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Lurah Memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item pertanyaan	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	33	34%
Setuju	43	45%
Netral	13	14%
Tidak Setuju	5	6%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 43 responden atau sebesar 45%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Luah telah menerapkan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat juga pada obesrvasi penelitian dilapangan bahwa, Lurah sering mengingatkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, lurah menugaskan bawahannya untuk mengingatkkan masyarakat

membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya dan Lurah selalu mengadakan sosialisasi atau pertemuan rutin bersama masyarakat membahas tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pada sub indikator pada proses kelompok telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu.

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Berantusias Ikut Serta dalam Sosialisasi Pentingnya Membayar PBB yang Diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	35	37%
Setuju	49	52%
Netral	9	9%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 49 responden atau sebesar 52%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak setuju dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 2%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat berantusias ikut serta dalam sosialisasi pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yang diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa, setiap diadakannya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan jumlah masyarakat yang ikut serta setiap 3 bulan sekali semakin bertambah. sehingga pada sub indikator pada

proses kelompok telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Lurah Mengadakan Seminar-Seminar tentang Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	30	32%
Setuju	45	47%
Netral	17	18%
Tidak Setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 45 responden atau sebesar 47%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tiak setuju dengan jumlah tidak ada responden yang memilih.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan Lurah selalu mengadakan seminar tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa setiap setahun sekali Lurah mengadakan seminar tentang pajak bumi dan bangunan dengan menghadirkan pemateri yang ahli dibidang perpajakan dan masyarakat sangat berantusias ikut serta dalam program tersebut. sehingga pada sub indikator pada proses kelompok telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pertanyaan dalam indikator proses kelompok pada variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan pada tabel 4.6 Sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Proses Kelompok

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	JUMLA H
Item 1	1	6	14	45	34	100
Item 3	-	2	9	52	37	100
Item 4	-	3	18	47	32	100
Rata-Rata	0,4	3,6	13,6	48	34,4	100

(Sumber data: Hasil Penelitian 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepemimpinan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 48% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 0,4% responden yang memberikan penilaian tidak pernah. Indikator proses kelompok di Kelurahan Bonto Sunggu menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki penilaian yang baik yaitu sebesar 82,4%. Namun ada juga responden memberikan penilaian tidak baik sebesar 17,6%. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator proses kelompok berada pada tingkat baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka proses kelompok telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa Lurah telah memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, masyarakat sangat berantusias ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu dan masyarakat ikut

serta dalam seminar-seminar tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yang diadakan oleh Lurah, sehingga pada variabel Kepemimpinan sub indikator proses kelompok dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa Lurah tidak menjalankan proses kelompok dengan baik penyebabnya yaitu, masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta sosialisasi dan seminar tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Kemampuan Mempengaruhi

Kemampuan mempengaruhi adalah dimana pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya (masyarakat) karena pemimpinlah yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dan pencapaian tujuan baik itu memberikan motivasi dan inovasi agar masyarakat mampu terpengaruhi oleh pemimpinnya. Kemampuan mempengaruhi termasuk bagian indikator dari variabel kepemimpinan yang terdiri dari 3 item pertanyaan yakni : tanggapan responden lurah memberikan motivasi agar membayar pajak bumi dan bangunan, tanggapan responden lurah selalu mengingatkan membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, dan tanggapan responden pihak kelurahan/tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan memberikan pelayanan yang baik. Adapun tanggapan responden mengenai kemampuan mempengaruhi dapat dilihat dari tabel 4.7 Sampai 4

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Lurah Memberikan Motivasi agar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	25	26
Setuju	48	51
Netral	16	17
Tidak Setuju	2	2
Sangat Tidak Setuju	4	4
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 48 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 51%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak setuju dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 2%.

Berdasarkan sesuai dengan tanggapan 95 responden maka sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa Lurah telah memberikan motivasi agar masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada obesrvasi peneliti dilapangan bahwa Lurah Bonto Sunggu memberikan penghargaan kepada masyarakat penghargaan tersebut berupa pujian yang selalu diberikan Lurah kepada masyarakat yang telah membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. sehingga pada sub indikator pada kemampuan mempengaruhi telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bunganan.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Lurah selalu Mengingatkan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tepat pada Waktunya

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	46	48
Setuju	33	35
Netral	10	11
Tidak Setuju	5	5
Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 46 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 48%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Berdasarkan sesuai dengan tanggapa 95 responden, sebaaian besar masyarakat menyatakan bahwa Lurah telah memberikan motivasi agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, setiap menjelang pembayaran pajak bumi dan bangunan pihak Kelurahan selalu mengingatkan masyarakat melalui menginformasikan masyarakat dengan mendatangai rumah kerumah dan masyarakat diinformasikan melalui RT/RW setempat agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. sehingga pada sub indikator pada kemampuan

mempengaruhi telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bungan.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Pihak Kelurahan/Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pelayanan yang baik.

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	36	38%
Setuju	38	40%
Netral	12	13%
Tidak Setuju	8	8%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.9 sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 38 responden dengan tingkat persentase sebesar 40%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa Pihak Kelurahan/Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pelayanan yang baik. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu pihak Kelurahan/tempat pembayaan pajak bumi dan bangunan memberikan pelayanan yang baik, proses pembyaran tidak berbeli-belit, melayani dengan sopan dan tidak membeda-bedakan masyarakat antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pada indikator kemampuan

mempengaruhi Lurah Bonto Sunggu telah menerapkan indikator tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pertanyaan dalam indikator kemampuan mempengaruhi pada variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan pada tabel 4. Sebagai berikut:

Tabel 4.10
Indikator Kemampuan Mempengaruhi

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	4	2	17	51	26	100
Item 2	1	5	11	35	48	100
Item 5	1	8	13	40	38	100
Rata-Rata	2	5	13,6	42	37,4	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.10 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator kemampuan mempengaruhi dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 42% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 2% responden memberikan penilaian tidak pernah. Indikator kemampuan mempengaruhi di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh dari hasil analisis indikator kemampuan mempengaruhi yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$42 + 37,4 = 79,4\%$$

Berdasarkan analisis diatas maka jumlah analisis sebesar 79,4 % dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan mempengaruhi berada pada kategori baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka kemampuan mempengaruhi telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa Lurah telah memberikan motivasi kepada masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan melalui Lurah memberikan pengharagaan berupa pujian kepada masyarakat yang membayar PBB, mengingatkan masyarakat membayar PBB tepat pada waktunya melalui menugaskan bawahannya mendatangi rumah masyarakat untuk menginformasikan untuk membayar PBB serta menginformasikan melalui RT/RW setempat agar membayar PBB tepat pada waktunya. Dan Lurah memberikan pelayanan yang baik melalui memudahkan proses pembayaran PBB serta tidak membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pada variabel Kepemimpinan sub indikator kemampuan mempengaruhi dapat dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini ada juga beberapa masyarakat yang merasa bahwa kemampuan Lurah mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB masih kurang baik sebabnya yaitu, masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa Lurah tidak memberikan motivasi, kurang meyakinkan masyarakat dalam membayar PBB serta pelayanan yang diberikan tidak baik. sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Sarana Pencapaian tujuan

Sarana pencapaian tujuan adalah dimana seorang pemimpin mampu menciptakan suatu keputusan dan strategi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya maksud dari sarana pencapaian tujuan dalam kepemimpinan yaitu pemimpin yang dijadikan sarana atau alat agar mencapai tujuan. Maka untuk mengetahui indikator sarana pencapaian tujuan diukur melalui sub indikator dalam 2 item pertanyaan : Tanggapan responden tentang sarana diruang pembayaran pbb sudah lengkap dan tanggapan responden tentang sarana ditempat pembayaran pbb sudah memnuhi standar yang ada. Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari 95 responden terhadap sub indikator sarana pencapaian tujuan dapat dilihat dalam pengolahan data pada tabel 4.11 Sampai 4.12 Sebagai berikut

Tabel 4.11
Tanggapan Responden tentang Sarana Diruang Pembayaran PBB sudah Lengkap

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	42	44
Setuju	40	42
Netral	9	10
Tidak Setuju	3	3
Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 42 responden dengan tingkat persentase sebesar 44%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa diruangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah lengkap. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa di ruangan pembayaran memiliki fasilitas yang tersedia seperti kursi, computer/laptop, AC (di Bank), kotak P3K, kotak saran dan masih banyak lagi sarana yang ada di ruangan pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat merasa nyaman. Sehingga pada sub indikator sarana pencapaian tujuan telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Table 4.12
Tanggapan Responden Tentang Sarana Ditempat Pembayaran PBB Sudah Memnuhi Standar Yang Ada

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	40	42%
Setuju	37	39%
Netral	13	14%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.12 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 40 responden dengan tingkat persentase sebesar 42%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa sarana ditempat pencapai tujuan telah memenuhi standar yang ada. Hal ini juga

terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa fasilitas yang ada diruangan pembayaran pajak memiliki fasilitas yang layak pakai, ruangan bersih dan nyaman, dan sarana atapun fasilitas yang ada telah lengkap dan membuat masyarakat merasa nyaman saat embayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga pada indikator saran pencapain tujuan telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadara akan membayar Pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data kedua pertanyaan dalam indikator sarana pencapaian tujuan pada variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan pada tabel 4.13 Sebagai berikut:

Tabel 4.13
Indikator Sarana Pencapaian Tujuan

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	1	3	10	42	44	100
Item 2	1	4	14	39	42	100
Rata-Rata	1	3,5	12	40,5	43	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.13 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator sarana pencapain tujuan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 43% responden memberikan penilaian sangat sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 1% responden memberikan penilaian tidak pernah. Indikator sarana pencapain tujuan di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh dari hasil analisis indikator yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$43 + 40,5 = 83,5\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka jumlah analisis sarana pencapaian tujuan sebesar 83,5 % dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada kategori baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka sarana pencapaian tujuan telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa Lurah telah memberikan fasilitas yang lengkap diruangan pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti kursi, laptop, kipas angin dan lain-lain sebagainya serta Lurah juga memberikan fasilitas yang telah memenuhi standar dengan memberikan fasilitas yang layak pakai, nyaman dan bersih. Sehingga pada variabel Kepemimpinan sub indikator sarana pencapaian tujuan dapat dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa Lurah Bonto Sunggu dalam memberikan sarana untuk pencapaian tujuan tersebut masih kurang baik dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yaitu, sarana yang ada masih kurang baik dan tidak memenuhi standar yang ada atau tidak sesuai dengan SOP. Sehingga masih ada beberapa masyarakat yang malas membayar pajak bumi dan bangunannya.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden tentang Kepemimpinan

Pertanyaan	Jawaban Responden										SKOR
	STS		TS		N		S		SS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	

Item 1	1	1	5	6	13	14	43	45	33	35	392
Item 2	-	-	2	2	9	9	49	52	35	37	410
Item 3	-	-	3	3	17	18	45	47	30	32	408
Item 4	4	4	2	2	16	17	48	51	25	26	397
Item 5	1	1	5	5	10	11	33	35	46	48	406
Item 6	1	1	8	8	12	13	38	40	36	38	404
Item 7	1	1	3	3	9	10	40	42	42	44	399
Item 8	1	1	4	4	13	14	37	39	40	42	385
Totak Skor											3201
Rata-Rata											400

Tabel 4.14 diatas, tanggapan responden tentang kepemimpinan dengan total skor 3201 atau rata-rata skor 400 dari 8 item pertanyaan yang didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor tertinggi pada setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kepemimpinan (X) adalah sebagai berikut:

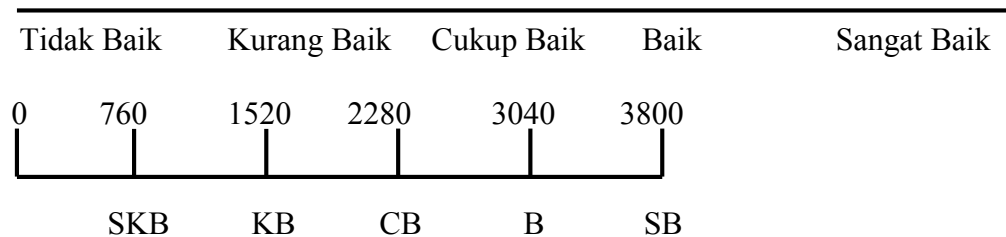
$$\begin{aligned} \text{Skor Maximum} &= \text{Skor tertinggi item pertanyaan} \times N \times \text{Item pertanyaan} \\ &= 5 \times 95 \times 8 = 3800 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 3201 maka tanggapan dari 95 responden terhadap kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu:

$$\frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maximum}} \times 100\% = \frac{3201}{3800} \times 100\% = 84\%$$

Maka hasil penelitian di Kelurahan Bonto Sunggu sebesar 84% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (X) ini berada pada penilaian sangat baik.





Keterangan

Sangat Baik (SB) = $5 \times 95 \times 8 = 3800$

Baik (B) = $4 \times 95 \times 8 = 3040$

Cukup Baik (CB) = $3 \times 95 \times 8 = 2280$

Kurang Baik (KB) = $2 \times 95 \times 8 = 1520$

Sangat Kurang Baik (SKB) = $1 \times 95 \times 8 = 760$

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu sangat baik. hal ini juga terlihat dari observasi penelitian dilapangan bahwa Lurah Bonto Sunggu telah menerapkan indikator proses kelompok, kemampuan mempengaruhi dan sarana pencapaian tujuan dengan baik. maka hal ini dapat dilihat dari 3 tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu: tiga tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dapat dilihat melalui tabel berikut yaitu:

Tabel 4.15
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Pendapatan Pajak
2015	92.873.100
2016	98.967.500
2017	105.672.500

Jumlah	297.513.100
---------------	--------------------

Sumber: Kelurahan Bonto Sunggu

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tiga tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu mengalami peningkatan yang cukup baik. sehingga kepemimpinan di kelurahan bonto sunggu dapat dikategorikan pada tingkat sangat baik dan mampu menyadarkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Hasil Analisis Tanggapan Responden tentang Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu

Kesadaran masyarakat adalah Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Maka untuk mengetahui tanggapan responden tentang kesadaran masyarakat dilakukan pengolahan data dengan menggunakan lima indikator instrumen. Adapun indikator Kesadaran masyarakat yaitu tentang struktur sosial masyarakat, sikap petugas dalam menagih, dan sanksi pajak bumi dan bangunan.

a. Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial masyarakat dalam kepemimpinan yaitu Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat, Baik itu Tingkat pendidikan, pengetahuannya tentang tujuan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kehidupan ekonomi masyarakat apakah mampu atau tidak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. untuk mengetahui indikator proses kelompok diukur melalui sub indikator dalam empat pertanyaan yakni : Tanggapan responden mampu

membayar pajak bumi dan bangunan, tanggapan responden membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan harta yang di miliki, tanggapan responden mengetahui arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dan tanggapan responden lurah adil dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari 95 responden terhadap sub indikator struktur sosial masyarakat dapat dilihat dalam pengolahan data tabel 4.16 sampai 4.20 sebagai berikut.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Mampu Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item pertanyaan	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	33	35%
Setuju	44	46%
Netral	15	16%
Tidak Setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.16 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 44 responden atau sebesar 46%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah tidak ada responden yang memilih.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat mampu membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi penelitian dilapangan bahwa masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, masyarakat mampu

membayar pajak bumi dan bangunan dan sebagian besar masyarakat Bonto Sunggu memiliki pemahaman tentang pentingnya membayar PBB sebagai penunjang kemajuan daerah. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat dikategorikan baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai dengan Harta Yang di Miliki

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	35	37%
Setuju	46	48%
Netral	11	11%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 46 responden atau sebesar 48%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah tidak ada responden yang menjawab.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan harta yang dimiliki. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu tidak ditemukannya masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan separuh harta yang dimiliki dalam hal harta yang memiliki wajib pajak bumi dan bangunan dan Lurah tidak membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya baik dari strata sosial maupun tingkat kedekatan antara Lurah dan

masyarakat. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat berada pada kategori diterapkan dengan baik di Kelurahan bonto Sunggu dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Mengetahui Arti Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	43	45%
Setuju	41	43%
Netral	8	9%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 43 responden atau sebesar 45%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat mengetahui arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, setiap rekap pendapatan pajak bumi dan bangunan hampir seluruh masyarakat telah membayar pajak bumi dan bangunan serta masyarakat membayar pajak tepat pada waktunya. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat berada pada kategori baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Bonto Sunggu.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Lurah Adil dalam Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	33	34
Setuju	43	45
Netral	10	11
Tidak Setuju	9	10
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber : Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 43 responden atau sebesar 45%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah responden tidak ada yang memilih jawaban tersebut.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah adil dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, perlakuan Lurah tidak membedakan masyarakat baik itu dari segi jabatan, kasta maupun strata sosial dan Lurah selalu memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat berada pada kategori baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data keempat pertanyaan dalam indikator struktur sosial masyarakat pada variabel kesadaran masyarakat dapat disimpulkan pada tabel 4.20 Sebagai berikut:

Tabel 4.20
Indikator Struktur Sosial Masyarakat

Item Pertanyaan Pertanyaan	TP (%)	KK (%)	CS (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	-	3	16	46	35	100
Item 2	-	4	11	48	37	100
Item 4	1	2	9	43	45	100
Item 5	-	10	11	45	34	100
Rata-Rata	0,25	4,75	11,75	45,5	37,75	100

(Sumber data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.20 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator struktur social masyarakat dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 45,5% responden memberikan penilaian sangat sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 0,25% responden memberikan penilaian tidak pernah. Hasil analisis indikator struktur sosial masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$37,5 + 45,5 = 83\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka hasil analisis indikator struktu sosial masyarakat sebesar 83%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada kategori baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka sarana pencapaian tujuan telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu masyarakat mampu membayar pajak bumi dan

bangunan, masyarakat membayar pajak sesuai dengan harta yang dimiliki, masyarakat mengetahui arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta Lurah adil dalam proses pembayaran pajaka bumi dan bangunan. Sehingga pada variabel Kesadaran masyarakat sub indikator struktur sosial masyarakat dapat dikategorikan baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa dalam struktur sosial Lurah membeda-bedakan masyarakatantara satu dan yang lainnya. Sehingga masih ada beberapa masyarakat yang malas membayar pajak bumi dan bangunan

b. Sikap Petugas dalam Menagih

Sikap petugas dalam menagih yaitu, Cara petugas dalam melayani ataupun menagih masyarakat harus bersikap ramah dan proses pembayaran pajak tidak berbelit-belit agar masyarakat merasa senang membayar pajak bumi dan bangunan. Sikap petugas dalam menagih ini termasuk bagian indikator kesadaran masyarakat yang memiliki lima item, maka untuk mengetahui sub indikator pada seni menciptakan kesepakatan dapat diukur melalui lima pertanyaan yakni: Tanggapan responden tentang pihak kelurahan mempermudah membayar pajak bumi dan bangunan, tanggapan responden tentang penagih pajak memberikan pelayanan sesuai sop dan tanggapan responden sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan dalam menagih pajak bumi dan bangunan. Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari ke 95 responden terhadap sub indikator sikap petugas dalam menagih dapat dilihat dari pengelolaan tabel 4.21 Sampai 4.23 Sebagai berikut.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden tentang Pihak Kelurahan Mempermudah Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	37	39
Setuju	47	50
Netral	6	6
Tidak Setuju	5	5
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.21 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 47 responden atau sebesar 50%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju, tidak ada responden yang menjawab.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, masyarakat tidak dipersulit ketika hendak membayar pajak bumi dan bangunan serta proses pembayaran pajak tidak berbeli-belit. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden tentang Penagih Pajak Memberikan Pelayanan sesuai SOP

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	40	42%
Setuju	40	42%
Netral	11	12%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.22 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dan setuju dengan jumlah sebanyak 40 responden atau sebesar 42%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak pernah dan kadang 2 respondeng dengan tingkat persentase 2%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa penagih pajak memberikan pelayanan sesuai SOP yang ada. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, petugas penagih pajak bumi dan bangunan melayani dengan ramah, langsung melayani masyarakat serta mengingatkan masyarakat pembayaran selanjutnya. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Sangat Puas terhadap Pelayanan Yang Diberikan oleh Pihak Kelurahan dalam Menagih Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	38	40%
Setuju	42	44%
Netral	7	8%
Tidak Setuju	7	7%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.23 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 42 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 44%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, petugas penagih pajak bumi dan bangunan melayani dengan baik,serta masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil analisis data keempat pertanyaan dalam indikator sikap petugas dalam menagih pada variabel Kesadaran masyarakat dapat disimpulkan pada tabel 4.24 Sebagai berikut:

Tabel 4.24
Indikator Sikap Petugas dalam Menagih

Item Pertanyaan Pertanyaan	TP (%)	KK (%)	CS (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	-	5	6	50	39	100
Item 4	2	2	12	42	42	100
Item 5	1	7	8	44	40	100
Rata-Rata	1	4,7	8,7	45,3	40,3	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.24 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator sikap petugas dalam menagih dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 45,5% responden memberikan penilaian sangat sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 1% responden memberikan penilaian tidak pernah. Hasil analisis indikator struktur sosial masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$37,5 + 45,3 = 82,8\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka hasil analisis indikator struktur sikap petugas dalam menagih sebesar 82,8%. Sesuai dengan tanggapan 95 responden. sesuai dengan hasil observasi yang didapa peneliti dilapangan yaitu, pihak kelurahan mempermudah masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, penagih pajak memberikan pelayanan sesuai SOP serta masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan. Sehingga pada variabel Kesadaran masyarakat sub indikator sikap petugas dalam menagih dapat dikategorikan baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa pihak penagih pajak memberikan pelayanan yang kurang baik serta tidak sesuai dengan SOP sehingga masyarakat masih ada yang malas membayar Pajak.

c. Sanksi

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi bagaian dari variabel Kesadaran masyarakat yang terdiri dari lima pertanyaan yakni: Tanggapan responden pemerintah setempat menerapkan sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan dan tanggapan responden tentang sanksi yang di terapkan merata dan adil kepada masyarakat. Adapun tanggapan responden mengenai sanksi dapat dilihat pada tabel 4.25 Sampai 4.26 berikut:

Tabel 4.25
Tanggapan Responden Pemerintah Setempat Menerapkan Sanksi Bagi Orang yang tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	30	31
Setuju	48	51
Netral	8	8
Tidak Setuju	9	10
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.25 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 48 responden dengan tingkat persentase sebesar 51%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju karena tidak ada responden yang memilih.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah menerapkan sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, pihak kelurahan mempersulit masyarakat yang hendak mengurus izin membangun (IMB), surat pengantar pembuatan KTP serta izin usaha maupun urusan lainnya yang terkait dengan pengurusan dikantor Lurah Bonto Sunggu. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden tentang Sanksi yang di Terapkan Merata dan Adil
Kepada Masyarakat

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	37	39
Setuju	50	53
Netral	6	6
Tidak Setuju	2	2
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.26 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 50 responden dengan tingkat persentase sebesar 53%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju tidak ada responden yang menjawab pertanyaan tersebut.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah menerapkan sanksi secara merata dan adil. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, Lurah tidak membeda-bedakan masyarakat ketika memberikan sanksi baik itu dari segi kekayaan, kedekatan serta status sosial yang dimiliki oleh masyarakat Lurah memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Sehingga pada sub indikator sanksi berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data pertanyaan dalam indikator sanksi pada variabel Kesadaran masyarakat dapat disimpulkan pada tabel 4.27 Sebagai berikut:

Tabel 4.27
Indikator Sanksi

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	JUMLA H
Item 1	-	4	11	49	36	100
Item 2	-	2	6	53	39	100
Rata-Rata	-	3	8,5	51	37,5	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.27 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator sanksi dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 51% yang memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu tidak pernah tidak ada responden yang menjawab. Hasil analisis Indikator sanksi di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh melalui yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$37,5 + 51 = 88,5\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka jumlah analisis sanksi sebesar 83,5 % dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada kategori sangat baik. Sesuai dengan tanggapan 95 responden, maka sanksi telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, Lurah telah memberikan sanksi secara tegas, adil dan memberikan sanksi kepada masyarakat secara merata. Sehingga pada variabel Kesadaran masyarakat sub indikator sanksi dapat dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.28
Tanggapan Responden tentang Kesadaran Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban Responden										SKOR
	STS		TS		N		S		SS		
	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	
Item 1	-	-	3	3	15	16	44	46	33	35	392
Item 2	-	-	4	4	10	11	46	48	35	37	397
Item 3	1	1	2	2	8	9	41	43	43	45	408
Item 4	-	-	9	10	10	11	43	45	33	34	385
Item 5	-	-	5	5	6	6	47	50	37	39	40
Item 6	2	2	2	2	11	12	38	40	40	42	399
Item 7	1	1	7	7	7	8	42	44	38	40	394
Item 8	-	-	9	10	8	8	48	51	30	31	384
Item 9	-	-	2	2	6	6	40	50	37	39	407
Totak Skor											3206
Rata-Rata											356,2

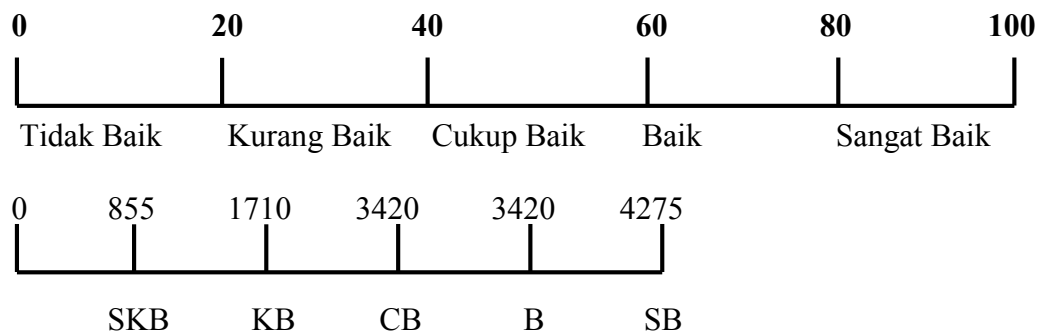
Berdasarkan tabel 4.28 diatas, tanggapan responden tentang kepemimpinan total skor sebesar 3206 atau rata-rata skor 4275 dari 9 item pertanyaan yang didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor tertinggi pada setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kepemimpinan (X) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor Maximum} &= \text{Skor tertinggi item pertanyaan} \times N \times \text{Item pertanyaan} \\ &= 5 \times 95 \times 9 = 4275 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 3206 maka tanggapan dari 95 responden terhadap kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu:

$$\frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maximum}} \times 100\% = \frac{3206}{4275} \times 100\% = 75\%$$

Maka hasil analisis sebesar 75% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (X) ini berada pada penilaian baik.



Keterangan

- Sangat Baik (SB) = $5 \times 95 \times 9 = 4275$
- Baik (B) = $4 \times 95 \times 9 = 3420$
- Cukup Baik (CB) = $3 \times 95 \times 9 = 2565$
- Kurang Baik (KB) = $2 \times 95 \times 9 = 1710$
- Sangat Kurang Baik (SKB) = $1 \times 95 \times 9 = 855$

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu baik. hal ini juga terlihat dari observasi penelitian dilapangan bahwa masyarakat telah sadar membayar pajak bumi dan banguna melalu sub indikator yaitu struktur sosial masyarkat, sikap petugas dalam menagih dan sanksi yang diterapkan. Maka hal ini dapat dilihat dari 3 tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelururahan Bonto Sunggu mengalami peningkatan dapat dilihat melalui tabel berikut yaitu:

Tabel 4.29
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Pendapatan Pajak	Persentase (%)
2015	92.873.100	13%
2016	98.967.500	26%
2017	105.672.500	39%
Jumlah	297.513.100	78%

Sumber: Kelurahan Bonto Sunggu

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tiga tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu mengalami peningkatan yang cukup baik. sehingga kesadaran masyarakat di kelurahan bonto sunggu dapat dikategorikan pada tingkat baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

C. Pengaruh Kepemimpinan (X) terhadap Kesadaran Masyarakat (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian untuk melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dengan jumlah 95 responden. Maka dilakukan Analisis Regresi Sederhana dengan rumus SPSS versi 23 yang dapat diperoleh seperti tabel 4. Sampai 4. Sebagai berikut:

Tabel 4.30
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3358.998	1	3358.998	31.308	.000 ^b
Residual	9977.886	93	107.289		
Total	13336.884	94			

a. Dependent Variable: kesadaran masyarakat

b. Predictors: (Constant), kepemimpinan

Tabel 4.31

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant) kepem Impinan	46.303	10.415		4.446	0,000
			0.502	5.595	0,000
	0.591	0.106			

a. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

Tabel 4.32

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	.502a	0.252	0.244	10.35805

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan

b. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kepemimpinan (X) terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) dapat ditentukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi sederhana dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen yaitu Kepemimpinan (X) terhadap variabel dependen yaitu Kesadaran Masyarakat (Y) di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana mengacu pada dua hal yakni:

a. Jika nilai signifikan lebih kecil $< 0,05$ artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel , maka H_a diterima dan H_o ditolak.

b. Jika nilai signifikan lebih besar $> 0,05$ artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.30 Anova digunakan untuk menentukan model persamaan regresi sederhana yang diketahui bahwa nilai F hitung = 31.308 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $< 0,05$ maka variabel kepemimpinan (X) berpengaruh terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y).

Adapun rumus model persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam menentukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini sebaga berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 46,303 + 0,591 (0)$$

$$Y = 46,303$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 0,591 yang menyatakan bahwa jika kepemimpinan (X) nilainya 0 maka hasil kesadaran masyarakat (Y) nilainya positif 46,303. Setiap penambahan 1% nilai kepemimpinan maka nilai kesadaran masyarakat semakin bertambah sebesar 0,591 koefisien regresi tersebut positif, sehingga dapat dikatakan berpengaruh antara variabel kepemimpinan (X) terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) dengan nilai sebesar 46,303. Apabila ditingkatkan nilai kepemimpinan (X) maka kesadaran masyarakat (Y) akan semakin meningkat berarti ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap

kesadaran masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil nilai signifikan (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga berarti H_a diterima dan H_0 ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.43 Model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,502 dari Output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,252 atau 25,5% yang mengandung arti bahwa besarnya pengaruh kepemimpinan (X) terhadap kesadaran masyarakat (Y) di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebesar 25,5% sedangkan sisanya 0,745 atau 74,5% yang diperoleh dari $100\% - 74,5\% = 25,5\%$ merupakan variabel yang diteliti sedangkan 74,5% variabel lain yang tidak diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data Pengaruh Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangun di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 3201 dari 95 responden dengan tingkat persentase sebesar 84% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (X) ini berada pada kategori penilaian sangat baik
2. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian kesadaran masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu diperoleh dari jumlah skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner yaitu sebesar 3206 dari 95 responden dengan tingkat persentase sebesar 75% yang menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) ini berada pada kategori penilaian baik.
3. Berdasarkan hasil nilai signifikan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu nilai (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga padapenelitian ini H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.32 Model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,502 dari Output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square)

sebesar 0,252 atau 25,5% yang mengandung arti bahwa besarnya pengaruh kepemimpinan (X) terhadap kesadaran masyarakat (Y) di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebesar 25,5% sedangkan sisanya 0,745 atau 74,5% yang diperoleh dari $100\% - 74,5\% = 25,5\%$ merupakan variabel yang diteliti sedangkan 74,5% variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

Mengacu pada hasil pengelolaan data pembahasan, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian dalam kepemimpinan hendaknya Lurah Bonto Sunggu lebih memperhatikan aspek-aspek kepemimpinan apa saja yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian maka hendaknya Lurah lebih meningkatkan strategi terhadap kesadaran masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.
3. Hendaknya kepemimpinan Lurah di Kelurahan Bonto Sunggu lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat lebih sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena kepemimpinan cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bohari, H. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: RajaWali.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Makassar: Alfabeta.
- Rivai dkk. 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Raja wali Pers.
- Rivai dkk. 2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Siahaan, Maribot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Soekarso, dkk. 2010. *Teori Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cetakan ke-25*, Bandung : Alfabeta
- Tarmudji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unes.
- Thoha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

JURNAL

- Haq, Nasrul dkk. 2015. *Kolaborasi Jurnal Admi istrasi Publik*. Makassar.
- Oktaliana, Fani. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Okataviani, Hana. 2011. *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mangkur Kota Semarang*. Semarang.
- Simanjuntak, Marsaulina. 2016. *Kelurahan Medan Sekip (Studi Kasus di Kelurahan Medan Sekip)*.
- Syukmawati, Reni. 2016. *Fungsi Kepemimpinan Lurah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan* : ejournal administrasi Negara, volume 4, Nomor 3, 2016 : 4478-4489

Sumarauw, Stefi. Creswell, Jhon w. 2016 . *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* Jakarta: Pustaka Belajar.

Surdiana. 2010. *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kualitas Pegawai*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Univeritas Brawijaya

Wijayanti, 2012. *Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kierja Karyawan PT. Daya Anugerah Semesta Semarang*. Disertasi tidak diterbitkan. Semarang : Program Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

DOKUMEN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) tentang pemerintah daerah

Dokumen Kelurahan Bonto Sunggu. 2017

L

A

M

P

I

R

A

N

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3358.998	1	3358.998	31.308	.000 ^b
	Residual	9977.886	93	107.289		
	Total	13336.884	94			

a. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

b. Predictors: (Constant), kepemimpinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.244	10.35805

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan

b. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46.303	10.415		4.446	.000
	kepemimpinan	.591	.106	.502	5.595	.000

a. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

pertanyaan1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	5	5.3	5.3	6.3
	N	13	13.7	13.7	20.0
	S	43	45.3	45.3	65.3
	SS	33	34.7	34.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	6	6.3	6.3	7.4
	N	9	9.5	9.5	16.8
	S	47	49.5	49.5	66.3
	SS	32	33.7	33.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	N	9	9.5	9.5	11.6
	S	49	51.6	51.6	63.2
	SS	35	36.8	36.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	17	17.9	17.9	21.1
	S	45	47.4	47.4	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	19	20.0	20.0	23.2
	S	34	35.8	35.8	58.9
	SS	39	41.1	41.1	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	1	1.1	1.1	2.1
	N	9	9.5	9.5	11.6
	S	41	43.2	43.2	54.7
	SS	43	45.3	45.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	7.4	7.4	7.4
	TS	10	10.5	10.5	17.9
	N	15	15.8	15.8	33.7
	S	33	34.7	34.7	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5.3	5.3	5.3
	N	12	12.6	12.6	17.9
	S	46	48.4	48.4	66.3
	SS	32	33.7	33.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7.4	7.4	7.4
	N	16	16.8	16.8	24.2
	S	38	40.0	40.0	64.2
	SS	34	35.8	35.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan10

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.2	4.2	4.2
	TS	3	3.2	3.2	7.4
	N	16	16.8	16.8	24.2
	S	40	42.1	42.1	66.3
	SS	32	33.7	33.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan11

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.2	4.2	4.2
	TS	2	2.1	2.1	6.3
	N	16	16.8	16.8	23.2
	S	48	50.5	50.5	73.7
	SS	25	26.3	26.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan12

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	5	5.3	5.3	6.3
	N	10	10.5	10.5	16.8
	S	33	34.7	34.7	51.6
	SS	46	48.4	48.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan13

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	3	3.2	3.2	4.2
	N	15	15.8	15.8	20.0
	S	40	42.1	42.1	62.1

SS	36	37.9	37.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan14

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	5	5.3	5.3	6.3
N	12	12.6	12.6	18.9
S	37	38.9	38.9	57.9
SS	40	42.1	42.1	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan15

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	8	8.4	8.4	9.5
N	12	12.6	12.6	22.1
S	38	40.0	40.0	62.1
SS	36	37.9	37.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan16

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	3	3.2	3.2	4.2
N	9	9.5	9.5	13.7
S	40	42.1	42.1	55.8
SS	42	44.2	44.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan17

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	5	5.3	5.3	7.4

	N	16	16.8	16.8	24.2
	S	44	46.3	46.3	70.5
	SS	28	29.5	29.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	4	4.2	4.2	5.3
	N	13	13.7	13.7	18.9
	S	37	38.9	38.9	57.9
	SS	40	42.1	42.1	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	11	11.6	11.6	14.7
	S	47	49.5	49.5	64.2
	SS	34	35.8	35.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	18	18.9	18.9	22.1
	S	43	45.3	45.3	67.4
	SS	31	32.6	32.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	N	10	10.5	10.5	12.6

	S	52	54.7	54.7	67.4
	SS	31	32.6	32.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	18	18.9	18.9	22.1
Valid	S	49	51.6	51.6	73.7
	SS	25	26.3	26.3	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	3	3.2	3.2	5.3
Valid	N	14	14.7	14.7	20.0
	S	45	47.4	47.4	67.4
	SS	31	32.6	32.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	11	11.6	11.6	12.6
Valid	N	12	12.6	12.6	25.3
	S	40	42.1	42.1	67.4
	SS	31	32.6	32.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	6	6.3	6.3	7.4

N	8	8.4	8.4	15.8
S	54	56.8	56.8	72.6
SS	26	27.4	27.4	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	3	3.2	3.2	3.2
N	15	15.8	15.8	18.9
Valid S	44	46.3	46.3	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	4	4.2	4.2	4.2
N	10	10.5	10.5	14.7
Valid S	46	48.4	48.4	63.2
SS	35	36.8	36.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5.3	5.3	5.3
N	4	4.2	4.2	9.5
Valid S	42	44.2	44.2	53.7
SS	44	46.3	46.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5.3	5.3	5.3
N	4	4.2	4.2	9.5
Valid S	42	44.2	44.2	53.7
SS	44	46.3	46.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	2	2.1	2.1	3.2
N	8	8.4	8.4	11.6
S	41	43.2	43.2	54.7
SS	43	45.3	45.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	9	9.5	9.5	9.5
N	10	10.5	10.5	20.0
S	43	45.3	45.3	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	5	5.3	5.3	5.3
N	6	6.3	6.3	11.6
S	47	49.5	49.5	61.1
SS	37	38.9	38.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7.4	7.4	7.4
N	10	10.5	10.5	17.9

S	43	45.3	45.3	63.2
SS	35	36.8	36.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	2	2.1	2.1	4.2
N	8	8.4	8.4	12.6
S	50	52.6	52.6	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	2	2.1	2.1	4.2
N	11	11.6	11.6	15.8
S	40	42.1	42.1	57.9
SS	40	42.1	42.1	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	7	7.4	7.4	8.4
N	7	7.4	7.4	15.8
S	42	44.2	44.2	60.0
SS	38	40.0	40.0	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

	TS	4	4.2	4.2	4.2
	N	12	12.6	12.6	16.8
Valid	S	42	44.2	44.2	61.1
	SS	37	38.9	38.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	6	6.3	6.3	9.5
Valid	S	48	50.5	50.5	60.0
	SS	38	40.0	40.0	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	N	12	12.6	12.6	12.6
Valid	S	42	44.2	44.2	56.8
	SS	41	43.2	43.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	4	4.2	4.2	7.4
Valid	S	47	49.5	49.5	56.8
	SS	41	43.2	43.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TS	5	5.3	5.3	5.3
Valid	N	7	7.4	7.4	12.6
	S	42	44.2	44.2	56.8

SS	41	43.2	43.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2.1	2.1	2.1
N	7	7.4	7.4	9.5
Valid S	56	58.9	58.9	68.4
SS	30	31.6	31.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	6	6.3	6.3	6.3
N	7	7.4	7.4	13.7
Valid S	46	48.4	48.4	62.1
SS	36	37.9	37.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	8	8.4	8.4	10.5
Valid N	6	6.3	6.3	16.8
S	46	48.4	48.4	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	6	6.3	6.3	6.3
Valid N	11	11.6	11.6	17.9
S	40	42.1	42.1	60.0

SS	38	40.0	40.0	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	8	8.4	8.4	9.5
N	10	10.5	10.5	20.0
S	43	45.3	45.3	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	4	4.2	4.2	4.2
N	10	10.5	10.5	14.7
S	47	49.5	49.5	64.2
SS	34	35.8	35.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	9	9.5	9.5	9.5
N	8	8.4	8.4	17.9
S	48	50.5	50.5	68.4
SS	30	31.6	31.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	6	6.3	6.3	6.3
N	13	13.7	13.7	20.0
S	52	54.7	54.7	74.7

SS	24	25.3	25.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2.1	2.1	2.1
N	6	6.3	6.3	8.4
Valid S	50	52.6	52.6	61.1
SS	37	38.9	38.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	11	11.6	11.6	11.6
N	9	9.5	9.5	21.1
Valid S	43	45.3	45.3	66.3
SS	32	33.7	33.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

BIODATA PENELITI



Andi Miftahul Jannah dilahirkan di Kabupaten Bantaeng pada hari rabu tanggal 05 bulan oktober tahun 1997. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Andi Hamka S dan Sitti Nurlaelah, S.Pdi. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Muhammadiyah Bantaeng lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMA 1 Bantaeng dengan jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi kependuan dan organisasi intra kampus dengan terlibat secara aktif di Gerakan Pramuka sejak duduk dibangku Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadran Masyarakat Membayar Pajak BUmi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ketahun memerlukan pembiayaan yang semakin besar. Hal ini berarti bahwa usaha pencairan dan penggalian sumber-sumber dana harus digiatkan dan ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada sehingga pembangunan dalam negeri berjalan dengan baik.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan yang nyata, dan bertanggung jawab didaerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali kota atau Bupati, didalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai penerima

pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Camat. Kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari (a) Pendapatan asli daerah meliputi : (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (b) Pendapatan transfer; dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketentuan diatas, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, kewenangan memungut Pajak Bumi dan bangunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Kemudian kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pajak daerah dan Retribusi Daerah Untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam pemungutan pajak ini.

Kepemimpinan secara luas adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi (Rivai, 2009:2). Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan sangat mempengaruhi kemana arah suatu organisasi dan menentukan tujuan suatu organisasi. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendanaan

pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan bangsa.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah atau bangunan tersebut (pemilik atau penyewa). Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penangannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini pemimpin sangat berperan penting dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan karena pemimpin puncak utama yang bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi didalam organisasinya. Keterangan di atas memberikan kesimpulan bahwa pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Termasuk kepemimpinan Lurah yang dimana lurah berperan mengatur seluruh aspek yaitu: Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan masyarakat,

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. termasuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,561. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai positif sebesar 4,844 hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 31,47%, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, di Kelurahan kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota. (Oktaliana, 2009)

Penelitian di atas menjelaskan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Lurah dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi kenyataannya setiap pelaksanaan suatu kebijakan pasti ada saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh setiap daerah contohnya saja hambatan yang dihadapi di kelurahan Bonto Sunggu yaitu: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Masih banyak masyarakat yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (3) Terbatasnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pentingnya PBB, (4) Kurangnya Sosialisasi dari Pihak Kelurahan.

Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara, serta melihat penelitian terdahulu tentang Pengaruh kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (di kelurahan Kota Matsum) maka penulis tertarik pula melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan responden tentang kepemimpinan ?
2. Bagaimana tanggapan responden tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui tanggapan responden tentang kepemimpinan
2. untuk mengetahui tanggapan responden tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan

3. untuk mengetahui kepemimpinan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kepemimpinan, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Dilihat dari sisi bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Menurut Kartono (Rivai dkk, 2012:2) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan disuatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan.

Menurut Bennis (Pasolong, 2008:2) mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil didunia, dan kepastian dengan hasil hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya.

Menurut Toha (Oktaliana, 2009) pemimpin birokrasi merupakan : “Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya.

Beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan

adalah seseorang yang memiliki jabatan yang tertinggi dan memiliki kepribadian khusus yang mampu mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai suatu tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dimana pemimpin sangat berperan penting dalam menentukan kemana arah organisasi itu.

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Sedang ilmu administrasi adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial, dan merupakan salah satu perkembangan dari filsafat. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin.

Gibson dkk (Pasolong, 2008:4) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa dan memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan.

Fiedler (Pasolong, 2008:47) menyatakan bahwa kinerja dapat dicapai secara efektif apabila pemimpin dalam organisasi tersebut mengembangkan suatu kepemimpinan situasional. Pendekatan situasional merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda.

Beberapa defenisi dan teori kepemimpinan diatas Stogdill (Pasolong, 2008:5)

mencoba mempetakkan teori kepemimpinan yaitu :

1. Kepemimpinan sebagai proses kelompok
2. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat
3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi
5. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku
6. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur

Teori kepemimpinan membahas tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi, mampu memecahkan masalah yang dihadapi seluruh bawahan yang dipimpinnya.

2. Sifat Kepemimpinan

Menurut Dewantara (Kolaborasi Jurnal Administrasi, 2015:100) menyatakan ada 3 (tiga) sifat Kepemimpinan yaitu :

- a. Pemimpin harus menjadikan dirinya sebagai panutan dan tauladan melalui sifat dan perbuatannya terutama sifat adil dan jujur dalam menjalankan tugas.

- b. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat pada bawahannya.
- c. Seorang pemimpin harus mampu atau sanggup bertanggung jawab bagi orang yang dipimpinnya.

3. Tipe Kepemimpinan

Kartono (2014:81-86) mengatakan bahwa ada beberapa tipe kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

- a. *Tipe Karismatis, tipe Karismatis* ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Sampai sekarangpun orang tidak mengetahui benar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu memiliki karisma begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan ghaib (*supernatural power*) dan kemampuan-kemampuan yang *superhuman*, yang diperolehnya sebagai karunia yang Mahakuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar.
- b. *Tipe Paternalistis* yaitu tipe Kepemimpinan yang kepatutan, dengan sifat-sifat yaitu, dianggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, dia bersikap terlalu melindungi (*overly protective*), dan selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

- c. *Tipe Militeristis* tipe ini sifatnya sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter.
- d. *Tipe Otokratis, tipe Otokrat* mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada *a one-man show*.
- e. *Tipe Laizsez Faire*, tipe ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri.
- f. *Tipe Populistis*, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan *solidaritas* rakyat misalnya soekarno dengan ideologi marhaenismenya.
- g. *Tipe Administratif* atau *eksekutif* adalah tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.
- h. *Tipe Administratif* berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik.

4. Fungsi Kepemimpinan

Menurut Hick dan Gullet (Pasolong, 2008:22) membagi 8 (delapan) fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Pemimpin sebagai penengah
- b. Pemimpin sebagai penganjur

- c. Pemimpin sebagai pemenuhan tujuan
- d. Pemimpin sebagai katalisator
- e. Pimpinan sebagai pemberi jaminan
- f. Pimpinan sebagai yang mewakili
- g. Pimpinan sebagai pembangkit semangat
- h. Pimpinan sebagai pemuji

5. Unsur-unsur Mendasari kepemimpinan

Veithzal Rivai (2012:23) mengatakan ada 3 (tiga) unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan, Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan).
- b. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok.
- c. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Melaksanakan tugas kepemimpinan untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang menuju kearah tujuan tertentu, kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut timbul dari diri kita sendiri. Pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok dan situasi waktu kita melaksanakan kepemimpinan.

Faktor-faktor yang berasal dari diri kita sendiri dan juga dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan kita adalah pengertian kita tentang kepemimpinan itu sendiri, nilai atau hal yang kita kejar dalam kepemimpinan, cara kita yang membuat kita

berhasil menduduki posisi kepemimpinan, dan pengalaman yang telah kita miliki dalam bidang kepemimpinan.

Pengetahuan seseorang tentang kepemimpinan dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinannya. Orang yang memiliki pandangan bahwa kepemimpinan itu merupakan status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, barang, kemudahan hidup, jelas akan menunjukkan kualitas praktek kepemimpinan yang sama sekali berbeda dengan orang yang memaknai kepemimpinan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya dan memandang fasilitas kepemimpinan sebagai alat untuk dapat melayani dengan lebih baik lagi. Menurut Soekarso dkk (2010:21) faktor-faktor kepemimpinan yaitu:

1. Pemimpin (*leader = head*) adalah orang yang memimpin.
2. Anggota (anak buah = pengikut) adalah orang-orang yang dipimpin.
3. Kekuasaan (*power*) adalah kapasitas mempengaruhi perilaku individu atau kelompok.
4. Pengaruh (*influence*) adalah tindakan atau contoh perilaku yang menyebabkan mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku individu atau kelompok.
5. Nilai (*value*) adalah keyakinan dasar tentang sesuatu mempengaruhi perilaku atau cara bertindak individu atau kelompok.
6. Tujuan (*objective*) adalah suatu hasil atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Gibson (Surdiana, 2009:273-274) kepemimpinan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu :

1. *Leader's traits*

Variabel ini terdiri dari kemampuan dan keterampilan seperti *interpersonal skill* dan IQ, kepribadian pemimpin seperti ketahanan terhadap stres dan kepercayaan diri dalam memimpin, serta motivasi pemimpin untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Leader's behavior*

Perilaku pemimpin dapat dibedakan menjadi

a. *Task oriented*

Pemimpin yang berfokus pada penyelesaian tugas dan menggunakan pengawasan yang ketat sehingga bawahan melakukan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b. *Person oriented*

Berfokus pada orang yang melakukan pekerjaan dan membantu pengikut dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

c. *Consideration*

Melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghormati, adanya kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut.

d. *Initiating structure*

Pemimpin mengatur hubungan dalam kelompok, membuat pola komunikasi, dan merincikan bagaimana pekerjaan itu diselesaikan.

3. *Situational variables.*

Variabel situasional mencakup tiga variabel yaitu:

- a. Hubungan antara pemimpin dan bawahan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan diantara mereka dan juga rasa hormat yang dimiliki bawahan pada atasan.
- b. Struktur tugas, struktur tugas ini menunjukkan karakteristik tugas yang hendak diselesaikan dan siapa yang menegerjakan. Posisi kekuasaan, posisi kekuasaan dilihat dari kemampuan pemimpin untuk memberikan penghargaan dan hukuman, serta kemampuan untuk memberikan semacam promosi.

Menurut Keith Davis (Thoha, 2003:15-16) ada empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan.

1. Kecerdasan

Bahwa pemimpin memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin

2. Kedewasaan dan Hubungan Sosial

Kepemimpinan cenderung matang dan mempunyai emosi yang stabil serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktifitas sosial.

3. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi.

4. Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan

Seorang pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.

Beberapa pendapat para ahli diatas faktor kepemimpinan merupakan aspek yang penitng dalam sebuah organisasi agar semua yang terlibat didalamnya mampu mengikuti arahan dari seorang pemimpin karena pemimpin memiliki kecerdasan yang lebih dari pada bawahannya.

7. Indikator Kepemimpinan

Pemimpin adalah pengaruh bagi orang yang dipimpinya. Seorang pemimpin dituntut untuk mengetahui secara utuh potensi organisasi yang dibawahinya untuk mampu memahami permasalahan dari segala aspek. Selain itu, pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah dengan baik dan membungkusnya agar tidak menjadi kekhawatiran bagi bawahan yang dipimpinya.

Penerapannya, pimpinan masih kurang optimal untuk mengelolah bawahannya serta dalam mengatasi permasalahan yang ada dibawah. Disinilah kematangan berpikir, keahlian berkomunikasi, serta menciptakan suasana kerja yang mendukung dari seorang pemimpin dibutuhkan.

Menurut Hamza B. Uno (Ramadani, 2009:58) indikator kepemimpinan yang mendasar dari perilaku sebagai pemimpin sebagai berikut:

a. Menantang Proses

Menantang proses disini pemimpin selalu mencari kesempatan atau peluang dalam upaya memajukan organisasi.

b. Memberi Inspirasi

Pimpinan menggambarkan masa depan organisasi atau memaparkan rencana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan kepada bawahan. Selain itu, pimpinan juga membantu orang lain atau pegawai dalam upaya pencapaian tujuan.

c. Memungkinkan Orang Lain Untuk bertindak

Mempercepat kerja sama antara pimpinan dengan pegawai, serta pegawai satu dengan pegawai lainnya. Hal ini pimpinan juga memperkuat pegawainya dalam melakukan pekerjaan.

d. Membuat Model Pemecahan

Pimpinan bersifat solutif atau memberikan solusi ketika organisasi atau bawahan sedang memiliki permasalahan. Pimpinan dapat memberikan contoh kepada bawahan dalam memecahkan masalah disertai memberikan rencana keberhasilan kecil apabila masalah tersebut dapat diselesaikan.

e. Memberikan Semangat

Pimpinan perlu mengakui kontribusi individu atau bawahannya. Pengakuan terhadap pegawai atau bawahan merupakan salah satu bentuk motivasi terhadap bawahannya. Pimpinan juga perlu merayakan prestasi kerja apabila tujuan ditentukan telah tercapai.

Menurut Wahjosum (Wijayanti, 2012:30-9) secara garis besar indikator kepemimpinan adalah sebagai berikut:

a. Bersikap adil

Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan diantar para anggota adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan dari pada kesepakatan antara para bawahan maupun antara pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Memberi Sugesti

Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya yang mampu menggerakkan hati orang lain dan sugesti mempunyai peranan yang sangat penting didalam memelihara dan membina harga diri bawahan.

c. Mendukung Tujuan

Tercapainya tujuan organisasi tidak secara otomatis terbentuk melainkan harus didukung oleh adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap organisasi dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan dengan keadaan organisasi serta memungkinkan para bawahan untuk bekerja sama.

d. Katalisator

Seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai katalisator, apabila pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada, berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat semaksimal

mungkin agar bawahan merasa nyaman dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

e. Menciptakan Rasa Aman

Setiap pimpinan berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para bawahannya dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme didalam menghadapi segala permasalahan, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bawahan merasa aman, bebas dari segala perasaan gelisah, kekhawatiran, dan merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan.

f. Sebagai Wakil Organisasi

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala bidang kegiatan lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan atau panutan-panutan. Seorang pemimpin adalah segala-galanya, oleh karena itu segala perilaku, perbuatan, dan kata-katanya akan selalu memberikan kesan-kesan tertentu terhadap organisasinya.

g. Sumber Inspirasi

Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan semangat para bawahan sehingga bawahan menerima dan memahami tujuan organisasi dengan antusias dan bekerja secara efektif kearah tercapainya tujuan organisasi.

B. Konsep Kesadaran Masyarakat

1. Definisi Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan masyarakat adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Purwardaminta (Oktaliana, 2009:19).

Menurut Widjaja (Oktaliana, 2009:6) sadar (kesadaran) di defenisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan dan yang hidup dalam masyarakat.

2. Definisi Kesadaran Hukum

Hukum adalah seperangkat dari aturan atau kaidah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian untuk ditaati dan dilaksanakan.

Menurut Scolten (Oktaviani, 2011:11) kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa yang hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kewajiban kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, anatar yang selayaknya dilakukan dan yang tidak sepatasnya dilakukan.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada, dimana dalam hal ini kesadaran hukum juga merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, karena selama ini ada persepsi bahwa hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya.

C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soeparman Soeharmidjaja (Bohari, 2010:24) dari disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong” menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari defenisi diataa tidak tampak isitilah “dipaksakan” karenan bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”.

Menurut Tarmudji (2001:2) Pajak adalah iuran dari rakyat atau penduduk sebagai partisipasi mereka dalam mengisi kas negara guna menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik dan lancar.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Menurut Siahaan (2009:77) Pajak Bumi dan Bangunan Merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan panti asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti kepemilikan tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan kedaerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

2. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No. 12 1994 yang dimaksudkan dengan obyek pajak adalah bumi dan bangunan yang berada di wilayah republik indonesia, yang klasifikasinya diatur oleh Menteri Keuangan. Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada diwilayah Indonesia dapat dijadikan sebagai obyek pajak. menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Permukaan Bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah indonesia contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.
- b. Bangunan: konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, empelasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, jalan tol, kolam renang, tambang minyak, dll.

Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki atau memperoleh manfaat atas bangunan. Artinya, sekalipun orang atau badan menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun jika secara nyata memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut maka wajib menanggung atau membayar pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 1 ayat (1) uu No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat oleh bumi
3. Memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. (Oktaviani:20).

Subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Proses Pembayaran Pajak

Menurut Soemitro (Oktaliana, 2009:12) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan untuk sampai pada pembayaran mulai dari tahap pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), penyampaian surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), dan sampai dengan penyampaian surat ketetapan pajak (SKP), adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran, dalam rangka pendaftaran obyek pajak maka subyek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas obyek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek pajak PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi SPOP dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat obyek pajak berada. Data yang harus didaftarkan dapat dilihat pada SPOP tersebut, dan tata cara pendaftaran obyek kena pajak diatur dalam keputusan menteri keuangan No.19/KMK/04/Tahun 1986 tanggal 19 januari 1986.
2. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat, dan waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kali setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

SPOP terlambat dikembalikan atau pengesiannya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan data yang tidak benar dengan sengaja maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) adapun yang dimaksud yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. SPPT ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan data yang diperoleh dalam SPOP yang dimasukkan oleh wajib pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Setelah SPO, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (pajak yang tertuang seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung.

4. Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Cara pembayaran PBB adalah wajib pajak yang telah menerima SPPT, SKP, dan STP dari KKP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui:

- a. Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau
- b. Petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi
- c. ATM dan Counter Teller Bank

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

5. Sanksi yang ada di dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana(Oktaviani:10)sebagai berikut:

1. Dipidana dengan kurungan selama–lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, isinya tidak benar sehingga negara dirugikan.
2. Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena pekerjaannya yang sengaja tidak memberikan dokumen atau memberikan keterangan sehingga negara dirugikan.
3. Didenda dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali apabila belum setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan dan hukuman yang telah diatur sesuai undang-undang yang berlaku.

D. Konsep Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat seperti itu maka akan mendorong keinginan yang kuat untuk eningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat

Menurut Tarmudji (2011:14) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan 4 (empat) faktor yaitu:

a. Sebab Kultural dan Historis,

sebab dimana rakyat indonesia mengalami penjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad di zaman kolonial maupun pada saat pendudukan Jepang masih belum lupa pada kepahitan masa penjajahan. Berdasarkan kepahitan pada masa penjajahan tersebut, khususnya pada bidang perpajakan rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak. Walaupun Indonesia sudah merdeka rakyat masih beranggapan bahwa pajak membebankan mereka.

b. Kurangnya Informasi

Sebab kurangnya penyuluhan dan informasi yang diberikan dari pemerintah kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara.

c. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

Adanya kebocoran pada penarikan pajak, kebocoran ini terjadi karen kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait dari petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Contohnya uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas untuk kepentingan serta keperluan pribadi.

- d. Suasana individu (belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah)

Rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Tarmudji (2011:26) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak yaitu:

a. Struktur Sosial Masyarakat

1. Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat.
2. Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB .
3. Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah mampu atau tidak untuk membayar PBB.

b. Sikap Petugas dalam Menagih

1. Cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB.
2. Usaha yang dilaksanakan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan tugasnya dalam menagih PBB.

c. Pelayanan Pemerintah

1. Usaha pemerintah dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Insentif pembayaran pajak, berupa pelayanan pemerintah yang lebih baik.

3. Keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari masyarakat.
- d. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
 1. Adanya aspek kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir PBB.
 2. Proses pembayaran PBB yang mudah diikuti wajib pajak
- e. Sanksi
 1. Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi.
 2. Penerapan sanksi secara tegas dan adil.

3. Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Menurut Hendono (Oktaviani:17) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

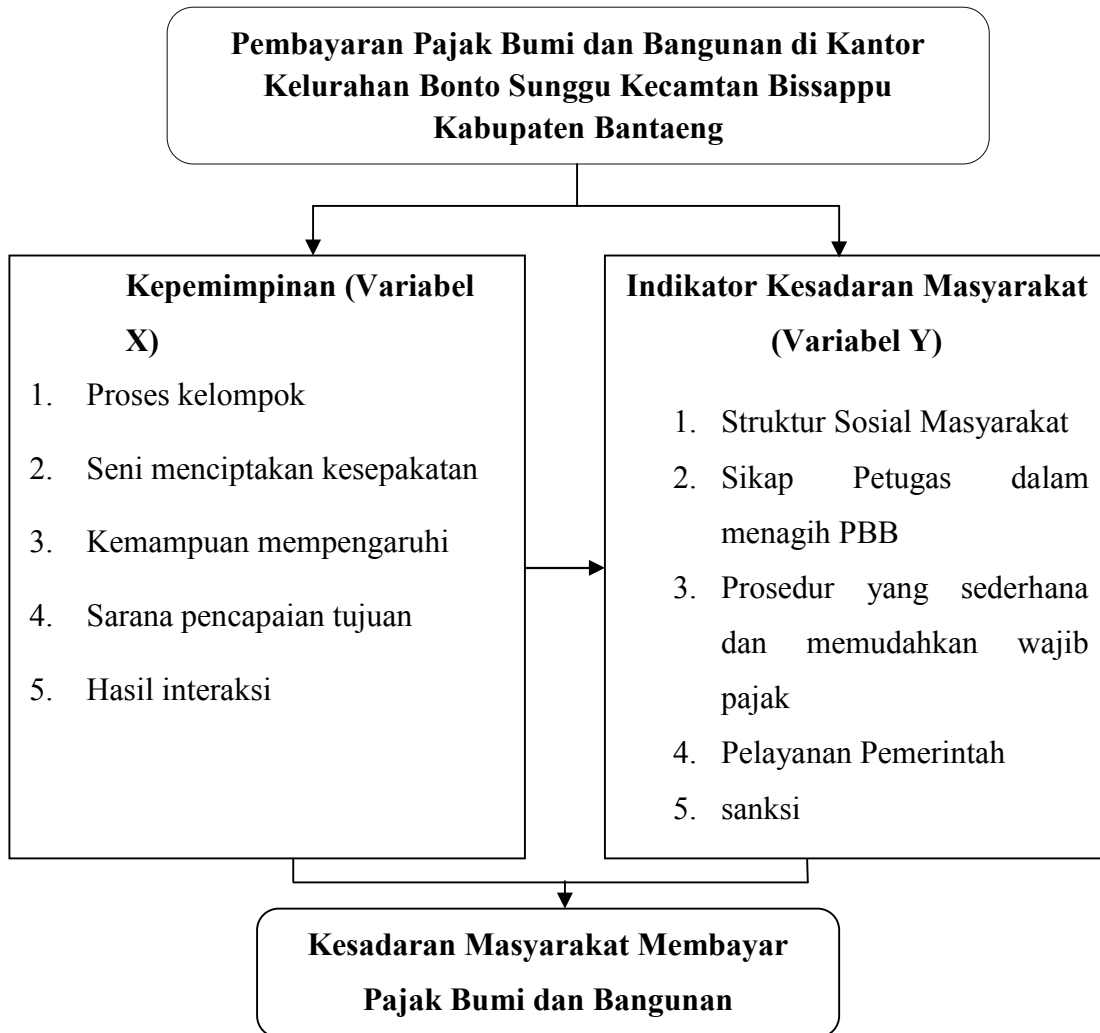
- a. Penyuluhan merupakan sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatkan Pelayanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak seperti BANK terdekat sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Memberikan penghargaan, kelurahan serta kecamatan yang dapat

menggerakkan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar tepat pada waktunya, untuk lebih memotivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan dapat memberikan suatu kebanggaan kepada individu.

E. Kerangka Pikir

Faktor-faktor diatas dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kerangka pikir ini disusun untuk memberikan gambaran dari alur penelitian yang dilakukan. untuk melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu, dimana indikator dari variabel X (kepemimpinan) yaitu dapat dilihat dari proses kelompok, seni menciptakan kesepakatan, kemampuan mempengaruhi, sarana pencapaian tujuan dan hasil interaksi. Sedangkan indikator dari variabel Y (kesadaran masyarakat) yaitu, dilihat dari struktur sosial masyarakat, sikap petugas dalam menagih, pelayanan pemerintah, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak dan sanksi. Dimana variabel X (kepemimpinan) mempengaruhi variabel Y (kesadaran masyarakat) agar tercapai kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut :

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1: kerangka Pikir

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan (X)

- a. Proses kelompok, yaitu dimana suatau kepemimpinan apapun yang

dilakukan harus berdasarkan kelompok saling bekerja sama agar pencapaian tujuan dapat tercapai.

- b. Seni menciptakan kesepakatan, kepemimpinan yaitu dimana pemimpin mampu menciptakan segala kesepakatan atau menentukan segala keputusan.
- c. Kemampuan mempengaruhi, dimana pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya (masyarakat) karena pemimpin lah yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan.
- d. Sarana pencapaian tujuan, dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuan ketika dalam suatu organisasi ada seorang pimpinan yang benar-benar menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana.
- e. Hasil interaksi, dimana dalam kepemimpinan melakukan suatu aktivitas yaitu interaksi antara bawahana dan pimpinan maka hasil dari interaksi tersebut yaitu menghasilkan suatu keputusan dan kesepakatan bersama.

2. Kesadaran Masyarakat (Y)

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adapun indikator yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Struktur Sosial Masyarakat yaitu, Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat. Baik itu Tingkat pendidikan dan

pengetahuannya tentang tujuan adanya PBB serta Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah mampu atau tidak untuk membayar PBB.

- b. Sikap Petugas dalam Menagih yaitu, Cara petugas bersikap dalam menagih masyarakat harus ramah dan tidak berbelit-belit dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat berkewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak yaitu Adanya aspek kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelayanan Pemerintah yaitu usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB dan melayani masyarakat secara prima agar mengetahui pentingnya membayar Pajak serta memberikan pelayanan yang baik dan adil.
- e. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan memberikan alur untuk dapat membuktikan masalah yang diteliti. Pembuktian dari hipotesis tersebut memerlukan teori yang didukung oleh data fakta yang jelas. Berdasarkan dengan masalah yang diteliti. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis kausalitas (sebab akibat) yang dimana sebab akibat yang bersifat saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Jadi dalam kausalitas dalam penelitian

ini ada 2 variabel yaitu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) maka penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

1. Hipotesis Nihil (H_0) Tidak terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
2. Hipotesis Alternatif (H_a) Terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 9 April sampai 9 Juni 2018, lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Laporan akhir untuk penelitian ini pada umumnya memiliki struktur yang ketat dan konsisten mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Seperti halnya peneliti kualitatif, siapapun yang terlibat didalam penelitian Kuantitatif juga perlu memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, mencegah munculnya bias-bias, mengontrol penjelasan-penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan menerapkan kembali penemuan-penemuannya Creswell (2016:5).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah survey yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dan responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat wajib pajak Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebanyak 1980 orang (wajib pajak). Sugiyono (2013:80)

Jumlah populasi masih besar sehingga penentuan populasi menggunakan teknik populasi sebagai berikut :

Jumlah populasi : 1980 orang (wajib pajak)
--

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *refresentatif* (mewakili). Sugiyono (2013:81)

Teknik pengambilan sampel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* dikatakan *simple* (sederhana)

karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Jumlah populasi penelitian yang cukup besar, yaitu 1980 orang dan adanya beberapa keterbatasan dari peneliti, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penarikan sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut :

Teknik Sampel

$$n = \frac{N}{(N \cdot d^2 + 1)}$$

Keterangan:

N = besar populasi

n = besar sampel

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (diambil 10% (0,1))

maka,

$$n = \frac{1980}{(1980 \cdot (0,1)^2 + 1)}$$

$$n = \frac{1980}{(1980 \cdot (0,01) + 1)}$$

$$n = \frac{1980}{19,8 + 1}$$

$$n = \frac{1980}{20,8}$$

n = 95 orang (wajib pajak)

Sehingga, 95 orang inilah yang akan menjadi sampel penelitian sekaligus menjadi responden penelitian yang akan dibagikan kuesioner nantinya.

D. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*liberariresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaan buku-buku literatur yang relevan dengan judul dan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian. Untuk menempatkan data lapangan, digunakan teknis sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang langsung dilakukan penulis terhadap arsip atau data tertulis yang dibuat secara berkala.
 - b. Kuesioner, yaitu pengumpulan sebuah data dengan menyebarkan daftar pertanyaan sehingga diperoleh data yang akurat. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, Sugiyono (2017 : 142). Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk *checklist*, dimana responden tinggal membubuhkan tanda *check* (✓) pada tempat yang telah disediakan. Peneliti membuat 2 (dua) buah kuesioner untuk penelitian ini, satu kuesioner untuk memperoleh data terkait Kepemimpinan (variabel X) dan satu kuesioner untuk memperoleh data terkait kesadaran masyarakat yang diberikan kepada masyarakat (variableY). Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif.

Nilai variabel yang diukur menggunakan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. *Skala Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi hal ini dijelaskan dalam Sugiyono (2017:93). Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5
2. Jawaban Setuju (S) : diberi skor 4
3. Jawaban Netral (N) : diberi skor 3
4. Jawaban Tidak Setuju (ts) : diberi skor 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan/ kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/ konsistensi kuesioner penelitian. Kuesioner yang sudah valid dan reliabel seluruh butirnya dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

Validitas konstruk (*construct validity*) dan validitas isi (*content validity*) akan dilakukan oleh peneliti untuk menguji apakah konstruk atau karakteristik (variabel laten) dalam penelitian ini, yaitu variabel kepemimpinan dan kesadaran masyarakat dapat diukur secara akurat oleh indikator-indikatornya. Peneliti akan melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan *software SPSS version 23.0*.

Reliabilitas, Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Instrumen dikatakan reliabel adalah jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai Cronbach's Alpa lebih besar dari 0,60. (Ghozali, 2005).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ada 2 yaitu :

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).

Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase (%). Penentuan persentase dari perolehan data hasil kuesioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan persentase:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

n = Skor yang diperoleh

N = Skor ideal

% = Persentase

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat yang bersifat kuantitatif, dimana hasil persentase itu dapat digolongkan dibawah ini.

Tabel 3.1. Kriteria Jawaban Responden

Persentase Jawaban	Tafsiran
80% - 100%	Sangat Baik
60% - <80%	Baik
40% - <60%	Cukup Baik
20% - < 40%	Kurang Baik
0% - < 20%	Sangat Tidak Baik

(Arikunto, 2006: 246)

2. Teknik Analisis Korelasi Sederhana

Rumusan masalah dan hipotesis penelitian ini termasuk dalam kategori kausalitas, hipotesis kausalitas (sebab akibat) adalah sebab akibat yang bersifat saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Jadi dalam kausalitas dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) sehingga dapat dianalisis melalui teknik analisis korelasi sederhana, yaitu variabel kepemimpinan dan variabel kesadaran masyarakat.

Analisis korelasi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *software SPSS version 23.0*. Guna memberi interpretasi terhadap kuatnya korelasi yang terjadi maka

digunakan pedoman sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2. Interpretasi Koefisien Kolerasi Nilai

Interval Koefisien	Tingkat Korelasi
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2017: 184

1. Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis regresi linear sederhana digunakan untuk melihat pengaruh variabel Responsivitas terhadap variabel Kepuasan Masyarakat. Digunakan pula untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*). Adapun rumus persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan rumus:

- \hat{Y} = variabel Kepuasan masyarakat
- X = variabel Responsivitas Birokrasi
- a = konstanta
- b = koefisien regresi

Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *software SPSS version 20*. Hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya, adalah:

- a. Jika nilai P value (sig) $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika nilai P value (sig) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Bonto Sunggu

Kelurahan Bonto Sunggu awal mulanya adalah sebuah desa yang terletak di Tala - Tala. Yang artinya banyak bukit- bukit yang ada disekitarnya dan masyarakat menginginkan suatu saat dengan banyak bukit–bukit tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan masyarakat sehingga mereka menyepakati untuk diberi nama Bonto Sunggu.

Konon katanya Bonto sunggu adalah tempat bersarangnya gerombolan, yang setiap saat datang mengganggu ketentraman masyarakat. Banyak orang yang dipenggal kepalanya dan dibiarkan berserakan begitu saja dan banyak juga rumah penduduk yang dibakar sehingga perempuan–perempuan yang keluar mengumpulkan kayu bakar dan mengangkat air merasa ketakutan melihat kejadian tersebut. Masyarakat menjadi resah dengan adanya sekelompok gerombolan yang ada di Bonto Sunggu sehingga mereka mengantisipasi dengan cara membuat lubang sebagai tempat persembunyian pada waktu malam hari. Menurut cerita ketika gerombolan masuk didaerah Tangnga–Tangnga untuk melakukan keributan maka amarahnya menjadi redah sehingga kampung tersebut dinamakan kampung Tangnga–Tanganga.

Lingkungan Tangnga–Tangnga ada juga kampung yang bernama Pocci Buttaya yang artinya adalah pusat dari tanah yang ada ditangnga-tangnga. Menurut cerita pusat tanah tersebut banyak batu diatasnya sehingga ketika ada seseorang

yang mengangkat batu tersebut maka tanah akan lubang kebawah sehingga akan menimbulkan kejadian/peristiwa yang tidak diinginkan. Sampai sekarang masyarakat menganggap kampung poccibuttayya adalah kampung yang angker.

Awalnya sistem pemerintahan di Bonto Sunggu diperintah oleh Jannang, Jannang pertama yang memerintah adalah Jannang Pallawa kemudian digantikan oleh Jannang Kallabo lalu Ambo Canning yang terakhir adalah Jannang Pattola. Pada masa pemerintahannya banyak perubahan yang terjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai sekarang. Setelah Jannang Pattola wafat digantikan oleh Nurmin Syawal pada tahun 1978 – 1980. Pada masa pemerintahannya belum banyak mengalami kemajuan. Kemudian digantikan oleh Wahid, lalu Tjenreng pada tahun 1980 – 1983 yang membawahi beberapa lingkungan antara lain adalah :

- a. Lingkungan Tala-Tala
- b. Lingkungan Tangnga–Tangnga
- c. Lingkungan Beloparang

Pada masa jabatan Tjenreng Desa Bonto Sunggu diusulkan untuk menjadi persiapan Kelurahan. Pada tahun 1986 Desa Bonto Sunggu resmi menjadi kelurahan (defenitif). Kemudian dimekarkan menjadi kelurahan Bonto Atu dan kelurahan Bonto Lebang. Setelah masa jabatannya habis, Tjenreng digantikan oleh Yakele dg ngolo, kemudian digantikan Lagi oleh A.R.Awaluddin.BA.Lalu Amiruddin.BA. Kemudian Mahmud Baddu, Kemudian Kr.Syamsi masa pemerintahan Kr. Syamsi tidak lama karena sesuatu hal sehingga digantikan oleh Anwar Nurmin masa jabatan dari Anwar Nurmin juga tidak lama karena waktu itu

pemilihan bupati di Bantaeng Bupati DR. Nurdin Abdullah melakukan perombakan dari semua pemerintahan kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sesuai dengan keputusan Bupati yang memerintah di Kelurahan Bonto Sunggu adalah Hj. Sohrah tahun 2008. Hj Sohrah memimpin Kelurahan Bonto Sunggu kurang lebih tiga tahun. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2011 Hj Sohrah di gantikan oleh Nasir Awing, S.Sos. setelah itu digantikan oleh Kareng Bella hingga sekarang.

Kelurahan Bonto Sunggu terletak diwilayah pemerintahan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Jarak dari Ibu kota Kecamatan \pm 3 Km dan jarak dari Ibukota Kabupaten \pm 3 Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh kekota Kecamatan \pm 10 menit, dan \pm 15 menit menuju Ibu kota Kabupaten.

Luas wilayah Kelurahan Bonto Sunggu \pm 2,74 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores.
3. Sebelah Utara berbatasan Kelurahan Bonto Atu dan Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng.

a. Fotografi Kelurahan

KelurahanBontoSunggu merupakan wilayah yang terdiri dari 3 dimensi

(pesisir, dataran dan ketinggian). Tiga dimensi tersebut dapat digambarkan bahwa untuk wilayah pesisir terletak di perkampungan tangnga-tangnga, cabodo, bungung bambang.dan wilayah dataran terletak di perkampungan poccibuttayya dan sasayya serta wilayah Pengunungan/ketinggian terletak perkampungan Bira-bira.Ketinggian dari permukaan laut 500 mtr.

2. Visi dan Misi Kelurahan Bonto Sunggu

a. Visi

Terwujudnya Kelurahan Bonto Sunggu yang maju dalam pengelolaan sumber daya alam (Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Rumput Laut) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga dengan pengelolaan dan pemanfaatannya senantiasa menjaga kelestarian dan berkesinambungan dengan kemampuan dan kapasitas yang memadai.

Masyarakat Bonto Sunggu khususnya orang miskin, perempuan dan yang terpinggirkan memperoleh pelayanan yang bermutu melalui pengembangan usaha, pendidikan, kesehatan dan Administrasi Pemerintahan dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar (tempat sampah, saluran pembuangan air limbah).

Terbangun hubungan kerjasama yang harmonis sesama warga, pemerintah dan warga dengan senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Warga sadar dan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan ditingkat RT, RW , Kelurahan maupun dalam organisasi sendiri. Kapasitas Pemerintah Kelurahan dan lembaga-lembaga seperti LPM, PKK dan Karang Taruna cukup memadai dan menerapkan nilai-

nilai demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta berkeadilan dalam pembangunan kelurahan.

b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan Kelurahan tersebut di atas, ditetapkan beberapa misi pembangunan Kelurahan Bonto Sunggu Tahun 2012 – 2016 :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan dan rumput laut.
3. Peningkatan pelayanan public guna terciptanya pemerintahan yang berkualitas.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha bersama.
5. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal.
6. Mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.

3. Administrasi Kelurahan

Secara administrasi Kelurahan Bonto Sunggu terbagi atas beberapa kampung yaitu Kampung Tangnga-Tangnga, Kampung Pocci Buttayya, Kampung Cabodo, Kampung Sasayya, kampung Bungung bambang dan Kampung Bira-Bira. Jikadit hubungkan dengan struktur pemerintahan yang ada, maka kampung tersebut

dapat di klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel Struktur Pemerintahan Kampung/Rukun Warga

No	Kampung	Struktur Pemerintahan
1	Kampung Tangnga-Tangnga	Rukun Warga I (RW)
2	Kampung Pocci Buttayya	Rukun Warga II (RW)
3	Kampung Cabodo	Rukun Warga III (RW)
4	BTN Sasayya	Rukun Warga IV (RW)
5	Kampung Bungung Bambang	Rukun Warga V, (RW)
6	Kampung Sasayya	Rukun Warga VI (RW)
7	Kampung Bira-Bira	Rukun Warga VII (RW)

(Sumber : Dokumen Kelurahan, 2017)

Setiap Rukun Warga tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan Publik kepada Masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas tersebut Ketua RW dibantu oleh Rukun tetangga (RT) sebagai bagian dari unsur pemerintahan terKecamatanil di kelurahan Bonto Sunggu. Dari 7 Rukun Warga tersebut diatas memiliki Rukun tetangga (RT) sebanyak 27 RT.

Setiap Rukun Warga tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan Publik kepada Masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas tersebut Ketua RW

dibantu oleh Rukun tetangga (RT) sebagai bagian dari unsur pemerintahan terkecil di kelurahan Bonto Sunggu dari 7 Rukun Warga tersebut diatas memiliki

Rukun tetangga (RT) sebanyak 27 RT sebagaimana dapat kami uraikan pada tabel berikut :

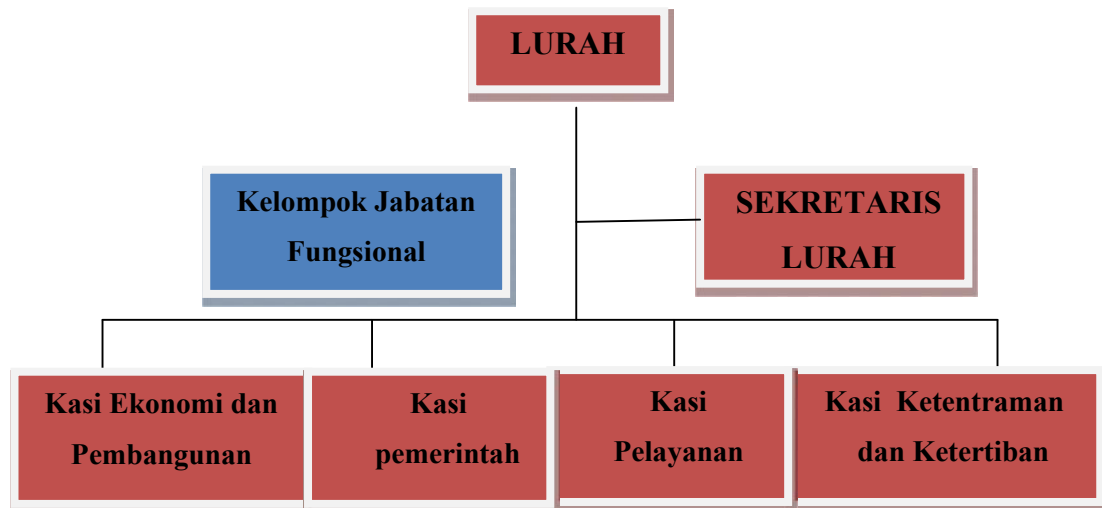
Tabel 4.2 Rukun Tetangga

Rukun Warga (RW)	Ketua Rukun Warga (RW)	Struktur Pemerintahan (Rukum Tetangga)
Rukun Warga I	H.Ridwan Samadi	6 Rukun Tetangga (RT)
Rukun Warga II	Hasdi Rusdi	6 Rukun tetangga (RT)
Rukun Warga III	ABD. Malik	4 Rukun Tetangga (RT)
Rukun Warga IV	Calla	3 Rukun tetangga (RT)
Rukun Warga V	M. Basir	2 Rukun tetangga (RT)
Rukun warga VI	L.Kadang	4 Rukun tetangga (RT)
Rukun Warga VII	Siamang	3 Rukun tetangga (RT)

(sumber : Dokumen Kelurahan, 2017)

Selain dari Unsur Pemerintahan Rukun warga dan Rukun Tetangga sebagaimana diuraikan pada tabel tersebut diatas, Kepala Kelurahan Bonto Sunggu dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh beberapa unsur pemerintahan lainnya seperti Sekretaris Kelurahan, Kaur, dan beberapa orang staff. Kepala Kelurahan pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Kelurahan dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat. Kemudian, Pemerintah Kelurahan bersama dengan LPM wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya. Selanjutnya struktur organisasi di kelurahan Bonto Sunggu :

Gambar.2
Struktur Organisasi Kelurahan Bonto Sunggu



4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok, lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Melaksanakan tugas dan fungsi, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

b. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyeenggaraan pemerintahan dan memberikan layanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program ditingkat kelurahan.
 2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dari penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
 3. Menyelenggarakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan.
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- c. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Kasi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

d. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.

e. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum.

f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

B. Analisis Deskripsi

1. Hasil Analisis Tanggapan Responden tentang Kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu

Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok orang untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahannya agar mencapai tujuan suatu organisasi. Maka untuk mengetahui tanggapan responden tentang kepemimpinan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan lima indikator instrumen tersebut. Adapun indikator Kepemimpinan yaitu proses kelompok, kemampuan mempengaruhi dan sarana pencapaian tujuan.

a. Proses Kelompok

Proses kelompok dalam kepemimpinan adalah dimana suatu pemimpin harus menjalankan organisasinya berdasarkan proses kelompok agar terciptanya kerjasama dan mencapai tujuan organisasi. Proses kelompok dalam penelitian ini adalah Tanggapan Responden Lurah Memberikan Sosialisasi tentang pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggapan responden berantusias ikut serta dalam sosialisasi penting nya membayar PBB yang diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu, Tanggapan Responden Lurah Mengadakan Seminar-Seminar tentang Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, . Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari 95 responden terhadap sub indikator proses

kelompok dapat dilihat dalam pengolahan data tabel 4.3 sampai 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Lurah Memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item pertanyaan	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	33	34%
Setuju	43	45%
Netral	13	14%
Tidak Setuju	5	6%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 43 responden atau sebesar 45%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Luah telah menerapkan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat juga pada obesrvasi penelitian dilapangan bahwa, Lurah sering mengingatkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, lurah menugaskan bawahannya untuk mengingatkkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya dan Lurah selalu mengadakan sosialisasi atau pertemuan rutin bersama masyarakat membahas tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pada sub

indikator pada proses kelompok telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu.

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Berantusias Ikut Serta dalam Sosialisasi Pentingnya Membayar PBB yang Diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	35	37%
Setuju	49	52%
Netral	9	9%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 49 responden atau sebesar 52%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak setuju dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 2%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat berantusias ikut serta dalam sosialisasi pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yang diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa, setiap diadakannya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan jumlah masyarakat yang ikut serta setiap 3 bulan sekali semakin bertambah. sehingga pada sub indikator pada proses kelompok telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Lurah Mengadakan Seminar-Seminar tentang
Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	30	32%
Setuju	45	47%
Netral	17	18%
Tidak Setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 45 responden atau sebesar 47%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tiak setuju dengan jumlah tidak ada responden yang memilih.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan Lurah selalu mengadakan seminar tentang pentingnya membayar pajak bumi dan banguna. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa setiap setahun sekali Lurah mengadakan seminar tentang pajak bumi dan bangunan dengan menghadirkan pemateri yang ahli dibidang perpajakan dan masyarakat sangat berantusias ikut serta dalam program tersebut. sehingga pada sub indikator pada proses kelompok telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan angunan.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pertanyaan dalam indikator proses kelompok pada variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan pada tabel 4.6 Sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Proses Kelompok

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	JUMLAH
Item 1	1	6	14	45	34	100
Item 3	-	2	9	52	37	100
Item 4	-	3	18	47	32	100
Rata-Rata	0,4	3,6	13,6	48	34,4	100

(Sumber data: Hasil Penelitian 2018)

Hasil analisis deskriptif tentang indikator kepemimpinan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 48% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 0,4% responden yang memberikan penilaian tidak pernah. Indikator proses kelompok di Kelurahan Bonto Sunggu menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki penilaian yang baik yaitu sebesar 82,4%. Namun ada juga responden memberikan penilaian tidak baik sebesar 17,6%. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator proses kelompok berada pada tingkat baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka proses kelompok telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa Lurah telah memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, masyarakat sangat berantusias ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan oleh Lurah Bonto Sunggu dan masyarakat ikut serta dalam seminar-seminar tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yang diadakan oleh Lurah, sehingga pada variabel Kepemimpinan sub indikator proses kelompok dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil

menjalankan tugasnya dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa Lurah tidak menjalankan proses kelompok dengan baik penyebabnya yaitu, masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta sosialisasi dan seminar tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Kemampuan Mempengaruhi

Kemampuan mempengaruhi adalah dimana pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya (masyarakat) karena pemimpinlah yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dan pencapaian tujuan baik itu memberikan motivasi dan inovasi agar masyarakat mampu terpengaruhi oleh pemimpinnya. Kemampuan mempengaruhi termasuk bagian indikator dari variabel kepemimpinan yang terdiri dari 3 item pertanyaan yakni : tanggapan responden lurah memberikan motivasi agar membayar pajak bumi dan bangunan, tanggapan responden lurah selalu mengingatkan membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, dan tanggapan responden pihak kelurahan/tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan memberikan pelayanan yang baik. Adapun tanggapan responden mengenai kemampuan mempengaruhi dapat dilihat dari tabel 4.7 Sampai 4

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Lurah Memberikan Motivasi agar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	25	26
Setuju	48	51
Netral	16	17
Tidak Setuju	2	2
Sangat Tidak Setuju	4	4
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 48 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 51%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak setuju dengan jumlah 2 responden dengan tingkat persentase 2%.

Berdasarkan sesuai dengan tanggapan 95 responden maka sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa Lurah telah memberikan motivasi agar masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada obesrvasi peneliti dilapangan bahwa Lurah Bonto Sunggu memberikan penghargaan kepada masyarakat penghargaan tersebut berupa pujian yang selalu diberikan Lurah kepada masyarakat yang telah membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. sehingga pada sub indikator pada kemampuan mempengaruhi telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bunganan.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Lurah selalu Mengingatkan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tepat pada Waktunya

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	46	48
Setuju	33	35
Netral	10	11
Tidak Setuju	5	5
Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 46 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 48%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Berdasarkan sesuai dengan tanggapa 95 responden, sebgaaian besar masyarakat menyatakan bahwa Lurah telah memberikan motivasi agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, setiap menjelang pembayaran pajak bumi dan bangunan pihak Kelurahan selalu mengingatkan masyarakat melalui menginformasikan masyarakat dengan mendatangi rumah kerumah dan masyarakat diinformasikan melalui RT/RW setempat agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. sehingga pada sub indikator pada kemampuan mempengaruhi telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bunganan.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Pihak Kelurahan/Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pelayanan yang baik.

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	36	38%
Setuju	38	40%
Netral	12	13%
Tidak Setuju	8	8%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.9 sebanyak 95 responden maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 38 responden dengan tingkat persentase sebesar 40%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa Pihak Kelurahan/Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pelayanan yang baik. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu pihak Kelurahan/tempat pembayaan pajak bumi dan bangunan memberikan pelayanan yang baik, proses pembyaran tidak berbeli-belit, melayani dengan sopan dan tidak membeda-bedakan masyarakat antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pada indikator kemampuan mempengaruhi Lurah Bonto Sunggu telah menerapkan indikator tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis data ketiga pertanyaan dalam indikator kemampuan mempengaruhi pada variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan pada tabel 4. Sebagai berikut:

Tabel 4.10
Indikator Kemampuan Mempengaruhi

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	4	2	17	51	26	100
Item 2	1	5	11	35	48	100
Item 5	1	8	13	40	38	100
Rata-Rata	2	5	13,6	42	37,4	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.10 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator kemampuan mempengaruhi dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 42% responden memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 2% responden memberikan penilaian tidak pernah. Indikator kemampuan mempengaruhi di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh dari hasil analisis indikator kemampuan mempengaruhi yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$42 + 37,4 = 79,4\%$$

Berdasarkan analisis diatas maka jumlah analisis sebesar 79,4 % dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan mempengaruhi berada pada kategori baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka kemampuan mempengaruhi telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat pada observasi peneliti di lapangan bahwa Lurah telah memberikan motivasi kepada masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan melalui Lurah memberikan pengharagaan berupa pujian kepada masyarakat yang membayar PBB, mengingatkan masyarakat membayar PBB tepat pada waktunya melalui menugaskan bawahannya mendatangi rumah masyarakat untuk menginformasikan untuk membayar PBB serta menginformasikan melalui RT/RW setempat agar membayar PBB tepat pada waktunya. Dan Lurah memberikan pelayanan yang baik melalui memudahkan proses pembayaran PBB serta tidak membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pada variabel Kepemimpinan sub indikator kemampuan mempengaruhi dapat dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini ada juga beberapa masyarakat yang merasa bahwa kemampuan Lurah mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB masih kurang baik sebabnya yaitu, masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa Lurah tidak memberikan motivasi, kurang meyakinkan masyarakat dalam membayar PBB serta pelayanan yang diberikan tidak baik. Sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Sarana Pencapaian tujuan

Sarana pencapaian tujuan adalah dimana seorang pemimpin mampu menciptakan suatu keputusan dan strategi agar dapat mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya maksud dari sarana pencapaian tujuan dalam kepemimpinan yaitu pemimpin yang dijadikan sarana atau alat agar mencapai tujuan. Maka untuk mengetahui indikator sarana pencapaian tujuan diukur melalui sub indikator dalam 2 item pertanyaan : Tanggapan responden tentang sarana diruang pembayaran pbb sudah lengkap dan tanggapan responden tentang sarana ditempat pembayaran pbb sudah memnuhi standar yang ada. Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari 95 responden terhadap sub indikator sarana pencapaian tujuan dapat dilihat dalam pengolahan data pada tabel 4.11 Sampai 4.12 Sebagai berikut

Tabel 4.11
Tanggapan Responden tentang Sarana Diruang Pembayaran PBB sudah Lengkap

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	42	44
Setuju	40	42
Netral	9	10
Tidak Setuju	3	3
Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 42 responden dengan tingkat persentase sebesar 44%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa diruangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah lengkap. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa di ruangan pembayaran

memiliki fasilitas yang tersedia seperti kursi, computer/laptop, AC (di Bank), kotak P3K, kotak saran dan masih banyak lagi sarana yang ada di ruangan pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat merasa nyaman. Sehingga pada sub indikator sarana pencapaian tujuan telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Table 4.12
Tanggapan Responden Tentang Sarana Ditempat Pembayaran PBB Sudah Memenuhi Standar Yang Ada

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	40	42%
Setuju	37	39%
Netral	13	14%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.12 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 40 responden dengan tingkat persentase sebesar 42%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa sarana ditempat pencapaian tujuan telah memenuhi standar yang ada. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa fasilitas yang ada diruangan pembayaran pajak memiliki fasilitas yang layak pakai, ruangan bersih dan nyaman, dan sarana ataupun fasilitas yang ada telah lengkap dan membuat

masyarakat merasa nyaman saat embayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga pada indikator sarana pencapain tujuan telah diterapkan dengan baik oleh Lurah Bonto Sunggu dan membuat masyarakat sadara akan membayar Pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data kedua pertanyaan dalam indikator sarana pencapaian tujuan pada variabel Kepemimpinan dapat disimpulkan pada tabel 4.13 Sebagai berikut:

Tabel 4.13
Indikator Sarana Pencapaian Tujuan

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	1	3	10	42	44	100
Item 2	1	4	14	39	42	100
Rata-Rata	1	3,5	12	40,5	43	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.13 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator sarana pencapain tujuan dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 43% responden memberikan penilaian sangat sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 1% responden memberikan penilaian tidak pernah. Indikator sarana pencapain tujuan di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh dari hasil analisis indikator yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$43 + 40,5 = 83,5\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka jumlah analisis sarana pencapaian tujuan sebesar 83,5 % dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada kategori baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka sarana pencapaian tujuan telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan bahwa Lurah telah memberikan fasilitas yang lengkap diruangan pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti kursi, laptop, kipas angin dan lain-lain sebagainya serta Lurah juga memberikan fasilitas yang telah memenuhi standar dengan memberikan fasilitas yang layak pakai, nyaman dan bersih. Sehingga pada variabel Kepemimpinan sub indikator sarana pencapaian tujuan dapat dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa Lurah Bonto Sunggu dalam memberikan sarana untuk pencapaian tujuan tersebut masih kurang baik dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yaitu, sarana yang ada masih kurang baik dan tidak memenuhi standar yang ada atau tidak sesuai dengan SOP. Sehingga masih ada beberapa masyarakat yang malas membayar pajak bumi dan bangunannya.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden tentang Kepemimpinan

Pertanyaan	Jawaban Responden										SKOR
	STS		TS		N		S		SS		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Item 1	1	1	5	6	13	14	43	45	33	35	392
Item 2	-	-	2	2	9	9	49	52	35	37	410
Item 3	-	-	3	3	17	18	45	47	30	32	408

Item 4	4	4	2	2	16	17	48	51	25	26	397
Item 5	1	1	5	5	10	11	33	35	46	48	406
Item 6	1	1	8	8	12	13	38	40	36	38	404
Item 7	1	1	3	3	9	10	40	42	42	44	399
Item 8	1	1	4	4	13	14	37	39	40	42	385
Totak Skor											3201
Rata-Rata											400

Tabel 4.14 diatas, tanggapan responden tentang kepemimpinan dengan total skor 3201 atau rata-rata skor 400 dari 8 item pertanyaan yang didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor tertinggi pada setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kepemimpinan (X) adalah sebagai berikut:

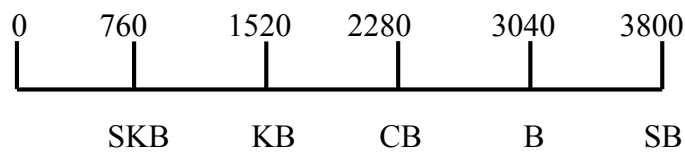
$$\begin{aligned} \text{Skor Maximum} &= \text{Skor tertinggi item pertanyaan} \times N \times \text{Item pertanyaan} \\ &= 5 \times 95 \times 8 = 3800 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 3201 maka tanggapan dari 95 responden terhadap kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu:

$$\frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maximum}} \times 100\% = \frac{3201}{3800} \times 100\% = 84\%$$

Maka hasil penelitian di Kelurahan Bonto Sunggu sebesar 84% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (X) ini berada pada penilaian sangat baik.





Keterangan

Sangat Baik (SB) = $5 \times 95 \times 8 = 3800$

Baik (B) = $4 \times 95 \times 8 = 3040$

Cukup Baik (CB) = $3 \times 95 \times 8 = 2280$

Kurang Baik (KB) = $2 \times 95 \times 8 = 1520$

Sangat Kurang Baik (SKB) = $1 \times 95 \times 8 = 760$

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu sangat baik. hal ini juga terlihat dari observasi penelitian dilapangan bahwa Lurah Bonto Sunggu telah menerapkan indikator proses kelompok, kemampuan mempengaruhi dan sarana pencapaian tujuan dengan baik. maka hal ini dapat dilihat dari 3 tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu: tiga tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dapat dilihat melalui tabel berikut yaitu:

Tabel 4.15
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Pendapatan Pajak
2015	92.873.100
2016	98.967.500
2017	105.672.500
Jumlah	297.513.100

Sumber: Kelurahan Bonto Sunggu

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tiga tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu mengalami peningkatan yang cukup baik. sehingga kepemimpinan dikelurahan bonto sunggu dapat dikategorikan pada tingkat sangat baik dan mampu menyadarkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Hasil Analisis Tanggapan Responden tentang Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu

Kesadaran masyarakat adalah Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Maka untuk mengetahui tanggapan responden tentang kesadaran masyarakat dilakukan pengolahan data dengan menggunakan lima indikator instrumen. Adapun indikator Kesadaran masyarakat yaitu tentang struktur sosial masyarakat, sikap petugas dalam menagih, dan sanksi pajak bumi dan bangunan.

a. Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial masyarakat dalam kepemimpinan yaitu Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat, Baik itu Tingkat pendidikan, pengetahuannya tentang tujuan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kehidupan ekonomi masyarakat apakah mampu atau tidak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. untuk mengetahui indikator proses kelompok diukur melalui sub indikator dalam empat pertanyaan yakni : Tanggapan responden mampu membayar pajak bumi dan bangunan, tanggapan responden membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan harta yang di miliki, tanggapan responden

mengetahui arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dan tanggapan responden lurah adil dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari 95 responden terhadap sub indikator struktur sosial masyarakat dapat dilihat dalam pengolahan data tabel 4.16 sampai 4.20 sebagai berikut.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Mampu Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item pertanyaan	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	33	35%
Setuju	44	46%
Netral	15	16%
Tidak Setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.16 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 44 responden atau sebesar 46%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah tidak ada responden yang memilih.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat mampu membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi penelitian dilapangan bahwa masyarakat Kelurahan Bonto Sunggu membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, masyarakat mampu membayar pajak bumi dan bangunan dan sebagian besar masyarakat Bonto Sunggu memiliki pemahaman tentang pentingnya membayar PBB sebagai

penunjang kemajuan daerah. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat dikategorikan baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai dengan Harta Yang di Miliki

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	35	37%
Setuju	46	48%
Netral	11	11%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 46 responden atau sebesar 48%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah tidak ada responden yang menjawab.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan harta yang dimiliki. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu tidak ditemukannya masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan separuh harta yang dimiliki dalam hal harta yang memiliki wajib pajak bumi dan bangunan dan Lurah tidak membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya baik dari strata sosial maupun tingkat kedekatan antara Lurah dan masyarakat. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat berada pada

kategori diterapkan dengan baik di Kelurahan bonto Sunggu dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Mengetahui Arti Pentingnya Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	43	45%
Setuju	41	43%
Netral	8	9%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah	95	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dengan jumlah sebanyak 43 responden atau sebesar 45%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat mengetahui arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, setiap rekap pendapatan pajak bumi dan bangunan hampir seluruh masyarakat telah membayar pajak bumi dan bangunan serta masyarakat membayar pajak tepat pada waktunya. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat berada pada kategori baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Bonto Sunggu.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Lurah Adil dalam Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	33	34
Setuju	43	45
Netral	10	11
Tidak Setuju	9	10
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100%

Sumber : Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 43 responden atau sebesar 45%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah responden tidak ada yang memilih jawaban tersebut.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah adil dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, perlakuan Lurah tidak membedakan masyarakat baik itu dari segi jabatan, kasta maupun strata sosial dan Lurah selalu memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga pada sub indikator struktur sosial masyarakat berada pada kategori baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data keempat pertanyaan dalam indikator struktur sosial masyarakat pada variabel kesadaran masyarakat dapat disimpulkan pada tabel 4.20 Sebagai berikut:

Tabel 4.20
Indikator Struktur Sosial Masyarakat

Item Pertanyaan Pertanyaan	TP (%)	KK (%)	CS (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	-	3	16	46	35	100
Item 2	-	4	11	48	37	100
Item 4	1	2	9	43	45	100
Item 5	-	10	11	45	34	100
Rata-Rata	0,25	4,75	11,75	45,5	37,75	100

(Sumber data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.20 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator struktur social masyarakat dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 45,5% responden memberikan penilaian sangat sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 0,25% responden memberikan penilaian tidak pernah. Hasil analisis indikator struktur sosial masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$37,5 + 45,5 = 83\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka hasil analisis indikator struktu sosial masyarakat sebesar 83%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada kategori baik.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden dan item-item pertanyaan, maka sarana pencapaian tujuan telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu masyarakat mampu membayar pajak bumi dan

bangunan, masyarakat membayar pajak sesuai dengan harta yang dimiliki, masyarakat mengetahui arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta Lurah adil dalam proses pembayaran pajaka bumi dan bangunan. Sehingga pada variabel Kesadaran masyarakat sub indikator struktur sosial masyarakat dapat dikategorikan baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa dalam struktur sosial Lurah membeda-bedakan masyarakatantara satu dan yang lainnya. Sehingga masih ada beberapa masyarakat yang malas membayar pajak bumi dan bangunan

b. Sikap Petugas dalam Menagih

Sikap petugas dalam menagih yaitu, Cara petugas dalam melayani ataupun menagih masyarakat harus bersikap ramah dan proses pembayaran pajak tidak berbelit-belit agar masyarakat merasa senang membayar pajak bumi dan bangunan. Sikap petugas dalam menagih ini termasuk bagian indikator kesadaran masyarakat yang memiliki lima item, maka untuk mengetahui sub indikator pada seni menciptakan kesepakatan dapat diukur melalui lima pertanyaan yakni: Tanggapan responden tentang pihak kelurahan mempermudah membayar pajak bumi dan bangunan, tanggapan responden tentang penagih pajak memberikan pelayanan sesuai sop dan tanggapan responden sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan dalam menagih pajak bumi dan bangunan. Untuk mendeskripsikan pertanyaan dari ke 95 responden terhadap sub indikator sikap petugas dalam menagih dapat dilihat dari pengelolaan tabel 4.21 Sampai 4.23 Sebagai berikut.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden tentang Pihak Kelurahan Mempermudah Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	37	39
Setuju	47	50
Netral	6	6
Tidak Setuju	5	5
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.21 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 47 responden atau sebesar 50%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju, tidak ada responden yang menjawab.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, masyarakat tidak dipersulit ketika hendak membayar pajak bumi dan bangunan serta proses pembayaran pajak tidak berbeli-belit. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden tentang Penagih Pajak Memberikan Pelayanan sesuai SOP

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	40	42%
Setuju	40	42%
Netral	11	12%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.22 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan sangat setuju dan setuju dengan jumlah sebanyak 40 responden atau sebesar 42%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan tidak pernah dan kadang 2 respondeng dengan tingkat persentase 2%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa penagih pajak memberikan pelayanan sesuai SOP yang ada. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, petugas penagih pajak bumi dan bangunan melayani dengan ramah, langsung melayani masyarakat serta mengingatkan masyarakat pembayaran selanjutnya. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Sangat Puas terhadap Pelayanan Yang Diberikan oleh Pihak Kelurahan dalam Menagih Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	38	40%
Setuju	42	44%
Netral	7	8%
Tidak Setuju	7	7%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.23 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 42 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 44%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan tingkat persentase 1%.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, petugas penagih pajak bumi dan bangunan melayani dengan baik,serta masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil analisis data keempat pertanyaan dalam indikator sikap petugas dalam menagih pada variabel Kesadaran masyarakat dapat disimpulkan pada tabel 4.24 Sebagai berikut:

Tabel 4.24
Indikator Sikap Petugas dalam Menagih

Item Pertanyaan Pertanyaan	TP (%)	KK (%)	CS (%)	S (%)	SS (%)	Jumlah
Item 1	-	5	6	50	39	100
Item 4	2	2	12	42	42	100
Item 5	1	7	8	44	40	100
Rata-Rata	1	4,7	8,7	45,3	40,3	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.24 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator sikap petugas dalam menagih dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 45,5% responden memberikan penilaian sangat sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu 1% responden memberikan penilaian tidak pernah. Hasil analisis indikator struktur sosial masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$37,5 + 45,3 = 82,8\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka hasil analisis indikator struktur sikap petugas dalam menagih sebesar 82,8%. Sesuai dengan tanggapan 95 responden. sesuai dengan hasil observasi yang didapa peneliti dilapangan yaitu, pihak kelurahan mempermudah masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, penagih pajak memberikan pelayanan sesuai SOP serta masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan. Sehingga pada variabel Kesadaran masyarakat sub indikator sikap petugas dalam menagih dapat dikategorikan baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan. Tetapi dalam hal ini masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa pihak penagih pajak memberikan pelayanan yang kurang baik serta tidak sesuai dengan SOP sehingga masyarakat masih ada yang malas membayar Pajak.

c. Sanksi

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi bagaian dari variabel Kesadaran masyarakat yang terdiri dari lima pertanyaan yakni: Tanggapan responden pemerintah setempat menerapkan sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan dan tanggapan responden tentang sanksi yang di terapkan merata dan adil kepada masyarakat. Adapun tanggapan responden mengenai sanksi dapat dilihat pada tabel 4.25 Sampai 4.26 berikut:

Tabel 4.25
Tanggapan Responden Pemerintah Setempat Menerapkan Sanksi Bagi Orang
yang tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	30	31
Setuju	48	51
Netral	8	8
Tidak Setuju	9	10
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.25 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 48 responden dengan tingkat persentase sebesar 51%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju karena tidak ada responden yang memilih.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah menerapkan sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, pihak kelurahan mempersulit masyarakat yang hendak mengurus izin membangun (IMB), surat pengantar pembuatan KTP serta izin usaha maupun urusan lainnya yang terkait dengan pengurusan dikantor Lurah Bonto Sunggu. Sehingga pada sub indikator sikap petugas dalam menagih berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden tentang Sanksi yang di Terapkan Merata dan Adil
Kepada Masyarakat

Item Pertanyaan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Setuju	37	39
Setuju	50	53
Netral	6	6
Tidak Setuju	2	2
Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah	95	100

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 4.26 diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi diperoleh pada item pernyataan setuju dengan jumlah sebanyak 50 responden dengan tingkat persentase sebesar 53%. Sedangkan penilaian paling terendah diperoleh pada item pernyataan sangat tidak setuju tidak ada responden yang menjawab pertanyaan tersebut.

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa Lurah menerapkan sanksi secara merata dan adil. Hal ini juga terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, Lurah tidak membeda-bedakan masyarakat ketika memberikan sanksi baik itu dari segi kekayaan, kedekatan serta status sosial yang dimiliki oleh masyarakat Lurah memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Sehingga pada sub indikator sanksi berada pada kategori baik dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis data pertanyaan dalam indikator sanksi pada variabel Kesadaran masyarakat dapat disimpulkan pada tabel 4.27 Sebagai berikut:

Tabel 4.27
Indikator Sanksi

Item Pertanyaan Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)	JUMLAH
Item 1	-	4	11	49	36	100
Item 2	-	2	6	53	39	100
Rata-Rata	-	3	8,5	51	37,5	100

(Sumber Data: Hasil Penelitian 2018)

Berdasarkan data tabel 4.27 diatas hasil analisis deskriptif tentang indikator sanksi dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yaitu 51% yang memberikan penilaian sering sedangkan penilaian rata-rata responden yang paling rendah yaitu tidak pernah tidak ada responden yang menjawab. Hasil analisis Indikator sanksi di Kelurahan Bonto Sunggu dapat diperoleh melalui yaitu:

Skor perolehan = Sangat sering + responden Sering = %

$$37,5 + 51 = 88,5\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas maka jumlah analisis sanksi sebesar 83,5 % dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berada pada kategori sangat baik. Sesuai dengan tanggapan 95 responden, maka sanksi telah diterapkan dengan baik. hal ini terlihat pada observasi peneliti dilapangan yaitu, Lurah telah memberikan sanksi secara tegas, adil dan memberikan sanksi kepada masyarakat secara merata. Sehingga pada variabel Kesadaran masyarakat sub indikator sanksi dapat dikategorikan Lurah Bonto Sunggu berhasil menjalankan tugasnya dan membuat masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.28
Tanggapan Responden tentang Kesadaran Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban Responden										SKOR
	STS		TS		N		S		SS		
	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	
Item 1	-	-	3	3	15	16	44	46	33	35	392
Item 2	-	-	4	4	10	11	46	48	35	37	397
Item 3	1	1	2	2	8	9	41	43	43	45	408
Item 4	-	-	9	10	10	11	43	45	33	34	385
Item 5	-	-	5	5	6	6	47	50	37	39	40
Item 6	2	2	2	2	11	12	38	40	40	42	399
Item 7	1	1	7	7	7	8	42	44	38	40	394
Item 8	-	-	9	10	8	8	48	51	30	31	384
Item 9	-	-	2	2	6	6	40	50	37	39	407
Totak Skor											3206
Rata-Rata											356,2

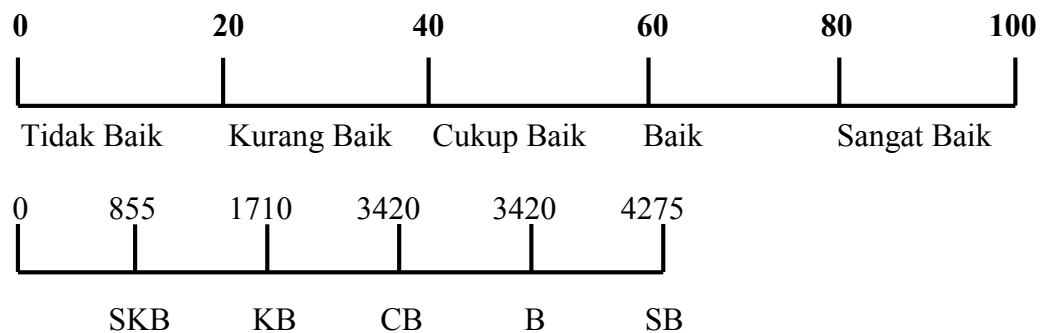
Berdasarkan tabel 4.28 diatas, tanggapan responden tentang kepemimpinan total skor sebesar 3206 atau rata-rata skor 4275 dari 9 item pertanyaan yang didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor tertinggi pada setiap item pertanyaan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel kepemimpinan (X) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor Maximum} &= \text{Skor tertinggi item pertanyaan} \times N \times \text{Item pertanyaan} \\ &= 5 \times 95 \times 9 = 4275 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil penelitian kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 3206 maka tanggapan dari 95 responden terhadap kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu yaitu:

$$\frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maximum}} \times 100\% = \frac{3206}{4275} \times 100\% = 75\%$$

Maka hasil analisis sebesar 75% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (X) ini berada pada penilaian baik.



Keterangan

Sangat Baik	(SB)	= 5 × 95 × 9 = 4275
Baik	(B)	= 4 × 95 × 9 = 3420
Cukup Baik	(CB)	= 3 × 95 × 9 = 2565
Kurang Baik	(KB)	= 2 × 95 × 9 = 1710
Sangat Kurang Baik	(SKB)	= 1 × 95 × 9 = 855

Sesuai dengan tanggapan 95 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu baik. hal ini juga terlihat dari observasi penelitian dilapangan bahwa masyarakat telah sadar membayar pajak bumi dan banguna melalu sub indikator yaitu struktur sosial masyarkat, sikap petugas dalam menagih dan sanksi yang diterapkan. Maka hal ini dapat dilihat dari 3 tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelururahan Bonto Sunggu mengalami peningkatan dapat dilihat melalui tabel berikut yaitu:

Tabel 4.29
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Pendapatan Pajak	Persentase (%)
2015	92.873.100	13%
2016	98.967.500	26%
2017	105.672.500	39%
Jumlah	297.513.100	78%

Sumber: Kelurahan Bonto Sunggu

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tiga tahun terakhir pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu mengalami peningkatan yang cukup baik. sehingga kesadaran masyarakat di kelurahan bonto sunggu dapat dikategorikan pada tingkat baik dan masyarakat sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan.

C. Pengaruh Kepemimpinan (X) terhadap Kesadaran Masyarakat (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian untuk melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dengan jumlah 95 responden. Maka dilakukan Analisis Regresi Sederhana dengan rumus SPSS versi 23 yang dapat diperoleh seperti tabel 4. Sampai 4. Sebagai berikut:

Tabel 4.30
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3358.998	1	3358.998	31.308	.000 ^b
Residual	9977.886	93	107.289		
Total	13336.884	94			

a. Dependent Variable: kesadaran masyarakat

b. Predictors: (Constant), kepemimpinan

Tabel 4.31
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant) kepem Impinan	46.303	10.415		4.446	0,000
			0.502	5.595	0,000
	0.591	0.106			

a. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

Tabel 4.32
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	.502a	0.252	0.244	10.35805

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan

b. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

Berdasarkan tabel diatas dpat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kepemimpinan (X) terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) dapat ditentukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi sederhana dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen yaitu Kepemimpinan (X) terhadap variabel dependen yaitu Kesadaran Masyarakat (Y) di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. Pemnagmbilan keputusan dalam uji regesi linear sederhana mengacu pada dua hal yakni:

- Jika nilai signifikan lebih kecil $< 0,05$ artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel , maka H_a diterima dan H_o ditolak.

- b. Jika nilai signifikan lebih besar $> 0,05$ artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.30 Anova digunakan untuk menentukan model persamaan regresi sederhana yang diketahui bahwa nilai F hitung = 31.308 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $< 0,05$ maka variabel kepemimpinan (X) berpengaruh terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y).

Adapun rumus model persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam menentukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini sebaga berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 46,303 + 0,591 (0)$$

$$Y = 46,303$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 0,591 yang menyatakan bahwa jika kepemimpinan (X) nilainya 0 maka hasil kesadaran masyarakat (Y) nilainya positif 46,303. Setiap penambahan 1% nilai kepemimpinan maka nilai kesadaran masyarakat semakin bertambah sebesar 0,591 koefisien regresi tersebut positif, sehingga dapat dikatakan berpengaruh antara variabel kepemimpinan (X) terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) dengan nilai sebesar 46,303. Apabila ditingkatkan nilai kepemimpinan (X) maka kesadaran masyarakat (Y) akan semakin meningkat berarti ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap

kesadaran masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil nilai signifikan (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga berarti H_a diterima dan H_0 ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.43 Model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,502 dari Output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,252 atau 25,5% yang mengandung arti bahwa besarnya pengaruh kepemimpinan (X) terhadap kesadaran masyarakat (Y) di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebesar 25,5% sedangkan sisanya 0,745 atau 74,5% yang diperoleh dari $100\% - 74,5\% = 25,5\%$ merupakan variabel yang diteliti sedangkan 74,5% variabel lain yang tidak diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data Pengaruh Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangun di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian kepemimpinan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng diperoleh skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 3201 dari 95 responden dengan tingkat persentase sebesar 84% menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan (X) ini berada pada kategori penilaian sangat baik
2. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian kesadaran masyarakat di Kelurahan Bonto Sunggu diperoleh dari jumlah skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner yaitu sebesar 3206 dari 95 responden dengan tingkat persentase sebesar 75% yang menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) ini berada pada kategori penilaian baik.
3. Berdasarkan hasil nilai signifikan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu nilai (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga padapenelitian ini H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.32 Model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,502 dari Output

tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,252 atau 25,5% yang mengandung arti bahwa besarnya pengaruh kepemimpinan (X) terhadap kesadaran masyarakat (Y) di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebesar 25,5% sedangkan sisanya 0,745 atau 74,5% yang diperoleh dari $100\% - 74,5\% = 25,5\%$ merupakan variabel yang diteliti sedangkan 74,5% variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

Mengacu pada hasil pengelolaan data pembahasan, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian dalam kepemimpinan hendaknya Lurah Bonto Sunggu lebih memperhatikan aspek-aspek kepemimpinan apa saja yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian maka hendaknya Lurah lebih meningkatkan strategi terhadap kesadaran masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.
3. Hendaknya kepemimpinan Lurah di Kelurahan Bonto Sunggu lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat lebih sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena kepemimpinan cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bohari, H. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: RajaWali.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Makassar: Alfabeta.
- Rivai dkk. 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Raja wali Pers.
- Rivai dkk. 2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Siahaan, Maribot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Soekarso, dkk. 2010. *Teori Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cetakan ke-25*, Bandung : Alfabeta
- Tarmudji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unes.
- Thoha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

JURNAL

- Haq, Nasrul dkk. 2015. *Kolaborasi Jurnal Admi istrasi Publik*. Makassar.
- Oktaliana, Fani. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Okataviani, Hana. 2011. *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mangkur Kota Semarang*. Semarang.
- Simanjuntak, Marsaulina. 2016. *Kelurahan Medan Sekip (Studi Kasus di Kelurahan Medan Sekip)*.

Syukmawati, Reni. 2016. *Fungsi Kepemimpinan Lurah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan* : ejournal administrasi Negara, volume 4, Nomor 3, 2016 : 4478-4489

Sumarauw, Stefi. Creswell, Jhon w. 2016 . *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* Jakarta: Pustaka Belajar.

Surdiana. 2010. *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kualitas Pegawai*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Univeritas Brawijaya

Wijayanti, 2012. *Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kierja Karyawan PT. Daya Anugerah Semesta Semarang*. Disertasi tidak diterbitkan. Semarang : Program Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

DOKUMEN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) tentang pemerintah daerah

Dokumen Kelurahan Bonto Sunggu. 2017

L

A

M

P

I

R

A

N

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3358.998	1	3358.998	31.308	.000 ^b
	Residual	9977.886	93	107.289		
	Total	13336.884	94			

a. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

b. Predictors: (Constant), kepemimpinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.244	10.35805

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan

b. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46.303	10.415		4.446	.000
	kepemimpinan	.591	.106	.502	5.595	.000

a. Dependent Variable: kesadranmasyarakat

pertanyaan1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	5	5.3	5.3	6.3
	N	13	13.7	13.7	20.0
	S	43	45.3	45.3	65.3
	SS	33	34.7	34.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	6	6.3	6.3	7.4
	N	9	9.5	9.5	16.8
	S	47	49.5	49.5	66.3
	SS	32	33.7	33.7	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	2.1	2.1	2.1
	N	9	9.5	9.5	11.6
	S	49	51.6	51.6	63.2
	SS	35	36.8	36.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	17	17.9	17.9	21.1
	S	45	47.4	47.4	68.4
	SS	30	31.6	31.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	19	20.0	20.0	23.2
	S	34	35.8	35.8	58.9

SS	39	41.1	41.1	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan6

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	1	1.1	1.1	2.1
N	9	9.5	9.5	11.6
S	41	43.2	43.2	54.7
SS	43	45.3	45.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan7

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	7	7.4	7.4	7.4
TS	10	10.5	10.5	17.9
N	15	15.8	15.8	33.7
S	33	34.7	34.7	68.4
SS	30	31.6	31.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan8

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	5	5.3	5.3	5.3
N	12	12.6	12.6	17.9
S	46	48.4	48.4	66.3
SS	32	33.7	33.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan9

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7.4	7.4	7.4
N	16	16.8	16.8	24.2
S	38	40.0	40.0	64.2
SS	34	35.8	35.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan10

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	4	4.2	4.2	4.2
TS	3	3.2	3.2	7.4
N	16	16.8	16.8	24.2
S	40	42.1	42.1	66.3
SS	32	33.7	33.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan11

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	4	4.2	4.2	4.2
TS	2	2.1	2.1	6.3
N	16	16.8	16.8	23.2
S	48	50.5	50.5	73.7
SS	25	26.3	26.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan12

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	5	5.3	5.3	6.3
N	10	10.5	10.5	16.8

S	33	34.7	34.7	51.6
SS	46	48.4	48.4	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	3	3.2	3.2	4.2
N	15	15.8	15.8	20.0
S	40	42.1	42.1	62.1
SS	36	37.9	37.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	5	5.3	5.3	6.3
N	12	12.6	12.6	18.9
S	37	38.9	38.9	57.9
SS	40	42.1	42.1	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	8	8.4	8.4	9.5
N	12	12.6	12.6	22.1
S	38	40.0	40.0	62.1
SS	36	37.9	37.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan16

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	3	3.2	3.2	4.2
	N	9	9.5	9.5	13.7
	S	40	42.1	42.1	55.8
	SS	42	44.2	44.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan17

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	5	5.3	5.3	7.4
	N	16	16.8	16.8	24.2
	S	44	46.3	46.3	70.5
	SS	28	29.5	29.5	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan18

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	4	4.2	4.2	5.3
	N	13	13.7	13.7	18.9
	S	37	38.9	38.9	57.9
	SS	40	42.1	42.1	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan19

		Frequen cy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	11	11.6	11.6	14.7

S	47	49.5	49.5	64.2
SS	34	35.8	35.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	3	3.2	3.2	3.2
N	18	18.9	18.9	22.1
Valid S	43	45.3	45.3	67.4
SS	31	32.6	32.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2.1	2.1	2.1
N	10	10.5	10.5	12.6
Valid S	52	54.7	54.7	67.4
SS	31	32.6	32.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	3	3.2	3.2	3.2
N	18	18.9	18.9	22.1
Valid S	49	51.6	51.6	73.7
SS	25	26.3	26.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	3	3.2	3.2	5.3
Valid	N	14	14.7	14.7	20.0
	S	45	47.4	47.4	67.4
	SS	31	32.6	32.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	11	11.6	11.6	12.6
Valid	N	12	12.6	12.6	25.3
	S	40	42.1	42.1	67.4
	SS	31	32.6	32.6	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	6	6.3	6.3	7.4
Valid	N	8	8.4	8.4	15.8
	S	54	56.8	56.8	72.6
	SS	26	27.4	27.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	3	3.2	3.2	3.2
N	15	15.8	15.8	18.9
Valid S	44	46.3	46.3	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	4	4.2	4.2	4.2
N	10	10.5	10.5	14.7
Valid S	46	48.4	48.4	63.2
SS	35	36.8	36.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5.3	5.3	5.3
N	4	4.2	4.2	9.5
Valid S	42	44.2	44.2	53.7
SS	44	46.3	46.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5.3	5.3	5.3
Valid N	4	4.2	4.2	9.5
S	42	44.2	44.2	53.7

SS	44	46.3	46.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	2	2.1	2.1	3.2
N	8	8.4	8.4	11.6
S	41	43.2	43.2	54.7
SS	43	45.3	45.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	9	9.5	9.5	9.5
N	10	10.5	10.5	20.0
S	43	45.3	45.3	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	5	5.3	5.3	5.3
N	6	6.3	6.3	11.6
S	47	49.5	49.5	61.1
SS	37	38.9	38.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7.4	7.4	7.4
N	10	10.5	10.5	17.9
S	43	45.3	45.3	63.2
SS	35	36.8	36.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	2	2.1	2.1	4.2
N	8	8.4	8.4	12.6
S	50	52.6	52.6	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	2	2.1	2.1	4.2
N	11	11.6	11.6	15.8
S	40	42.1	42.1	57.9
SS	40	42.1	42.1	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	7	7.4	7.4	8.4

	N	7	7.4	7.4	15.8
	S	42	44.2	44.2	60.0
	SS	38	40.0	40.0	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TS	4	4.2	4.2	4.2
	N	12	12.6	12.6	16.8
Valid	S	42	44.2	44.2	61.1
	SS	37	38.9	38.9	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	TS	3	3.2	3.2	3.2
	N	6	6.3	6.3	9.5
Valid	S	48	50.5	50.5	60.0
	SS	38	40.0	40.0	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	N	12	12.6	12.6	12.6
Valid	S	42	44.2	44.2	56.8
	SS	41	43.2	43.2	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.2	3.2	3.2

N	4	4.2	4.2	7.4
S	47	49.5	49.5	56.8
SS	41	43.2	43.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	5	5.3	5.3	5.3
N	7	7.4	7.4	12.6
Valid S	42	44.2	44.2	56.8
SS	41	43.2	43.2	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2.1	2.1	2.1
N	7	7.4	7.4	9.5
Valid S	56	58.9	58.9	68.4
SS	30	31.6	31.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	6	6.3	6.3	6.3
N	7	7.4	7.4	13.7
Valid S	46	48.4	48.4	62.1
SS	36	37.9	37.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.1	2.1	2.1
TS	8	8.4	8.4	10.5
N	6	6.3	6.3	16.8
S	46	48.4	48.4	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	6	6.3	6.3	6.3
N	11	11.6	11.6	17.9
S	40	42.1	42.1	60.0
SS	38	40.0	40.0	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan20

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.1	1.1	1.1
TS	8	8.4	8.4	9.5
N	10	10.5	10.5	20.0
S	43	45.3	45.3	65.3
SS	33	34.7	34.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.2	4.2	4.2
N	10	10.5	10.5	14.7
S	47	49.5	49.5	64.2

SS	34	35.8	35.8	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	9	9.5	9.5	9.5
N	8	8.4	8.4	17.9
Valid S	48	50.5	50.5	68.4
SS	30	31.6	31.6	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	6	6.3	6.3	6.3
N	13	13.7	13.7	20.0
Valid S	52	54.7	54.7	74.7
SS	24	25.3	25.3	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	2	2.1	2.1	2.1
N	6	6.3	6.3	8.4
Valid S	50	52.6	52.6	61.1
SS	37	38.9	38.9	100.0
Total	95	100.0	100.0	

pertanyaan25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	11	11.6	11.6	11.6
N	9	9.5	9.5	21.1
Valid S	43	45.3	45.3	66.3
SS	32	33.7	33.7	100.0
Total	95	100.0	100.0	

BIODATA PENELITI



Andi Miftahul Jannah dilahirkan di Kabupaten Bantaeng pada hari rabu tanggal 05 bulan oktober tahun 1997. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Andi Hamka S dan Sitti Nurlaelah, S.Pdi. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Muhammadiyah Bantaeng lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMA 1 Bantaeng dengan jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi kepanduan dan organisasi intra kampus dengan terlibat secara aktif di Gerakan Pramuka sejak duduk dibangku Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kesadran Masyarakat Membayar Pajak BUMi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”